



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai prasyarat utama pembangunan nasional maka diperlukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bayumas tahun 2019-2023;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sehingga Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bayumas tahun 2019-

2023 perlu dilakukan peninjauan kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5-69/2019);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2023-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010- 2025.
7. *Road Map* Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2024 yang selanjutnya disebut dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
8. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/atau jangka pendek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman rencana kerja bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tahun 2023- 2024.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar tercipta birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari Reformasi Birokrasi general dan tematik.

- (2) Reformasi Birokrasi general dilaksanakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
- (3) Reformasi Birokrasi tematik dilaksanakan untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah.

Pasal 5

Sasaran strategis Reformasi Birokrasi general sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan
- b. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Pasal 6

Tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Pengentasan kemiskinan;
- b. Peningkatan investasi;
- c. Digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting; dan
- d. Percepatan prioritas aktual presiden, yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Pasal 7

Reformasi Birokrasi general dan tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan selama kurun waktu 2 (dua) tahun.

BAB IV

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 8

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah periode tahun 2023-2024.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BAB V : PENUTUP

- (2) Penjabaran penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah menetapkan rencana dan target Reformasi Birokrasi setiap tahun, yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2019- 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bayumas Tahun 2019 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **20 SEP 2023**

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2023-2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah 73,08 dengan kategori BB. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ini menjadikan Pemerintah Kabupaten Banyumas menduduki peringkat pertama di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Meskipun capaian indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2022 menduduki peringkat pertama di tingkat Provinsi Jawa Tengah, namun ternyata belum mampu berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan secara optimal. Pada tahun 2022 capaian angka kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah sebesar 12,84% dari target sebesar 11,76% sehingga Pemerintah Kabupaten Banyumas di tunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pilot project tahap 2 (dua) Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, Pemerintah Daerah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya selama kurun waktu tertentu dengan sasaran per tahun yang jelas.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten

Banyumas tahun 2023-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dalam rangka mengawal *Road Map* Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2023-2024 agar sesuai dengan yang direncanakan, maka dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, dan lingkup pemerintah daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Berdasarkan proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dibenahi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

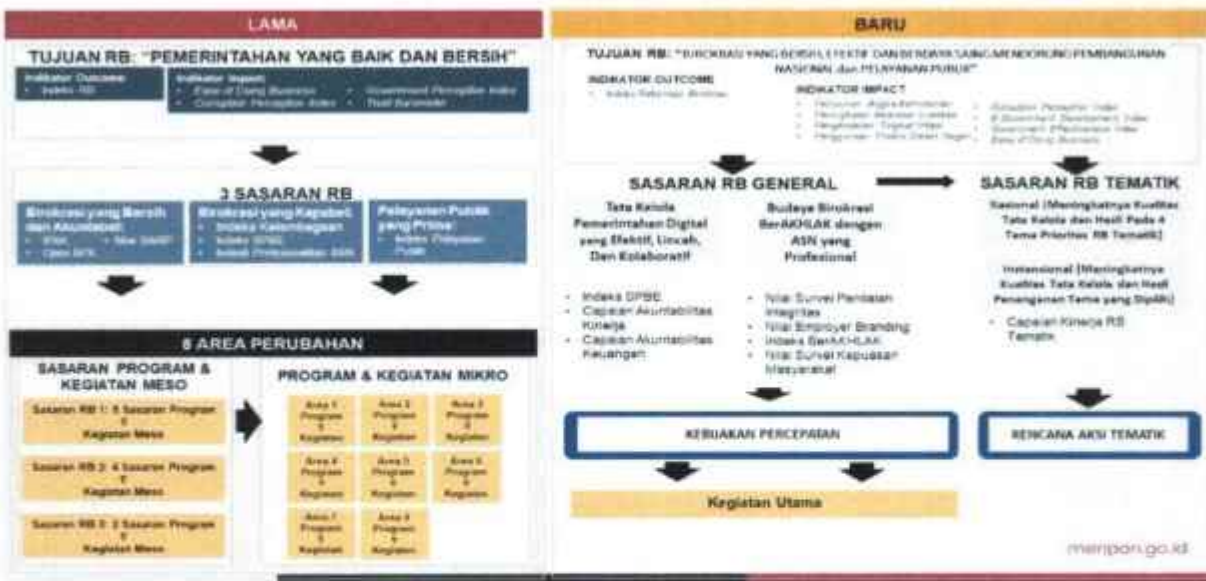
Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, aspek utama yang ditajamkan dari *Road Map* RB 2020-2024, meliputi :

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis

nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.

2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
4. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan *Road Map* RB 2020-2024 diilustrasikan dalam gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-

citakan pada tahun 2026. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* RB.

1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut :

a. Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB.

Namun dalam praktiknya, peran yang *silo* masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

b. Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

c. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang

sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi.

Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- d. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- e. Budaya Birokrasi : BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan,

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh ASN, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut :

- a. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- b. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi.

- c. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh

sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

d. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan proses perubahan melalui langkah-langkah konkrit percepatan untuk memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan dalam rangka menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah :

- a. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB;
- b. Menetapkan Rencana Aksi RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan;
- c. Menetapkan Rencana Aksi RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.

BAB II

GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

A. GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan tahapan pembangunan yang meliputi periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional I (2005-2009), periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II (2010-2014), periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III (2015-2019) dan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (2020-2024). Dengan adanya sasaran pembangunan tersebut, maka dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*. *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi* yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014, pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi prioritas nasional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas nasional, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu indikator tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan program reformasi birokrasi dengan baik, hal ini tampak pada indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 dimana indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah 73,08 dengan kategori BB.

B. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

Implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas secara umum telah dilaksanakan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas yang dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB Kabupaten Banyumas sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja telah dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalihkan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional sebanyak 237 Jabatan Administrasi.

2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Hal ini tercermin pada nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 memperoleh nilai 2,6 dengan kategori Baik.

3. Efisiensi APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP telah berhasil mencegah terjadinya pemborosan APBD. Dengan dilaksanakannya SAKIP, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas selalu melaksanakan reviu terhadap program/kegiatan dalam rangka pencapaian visi misi Bupati. Dari hasil reviu ini diperoleh program/kegiatan yang benar-benar memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi. Sehingga terhadap program/kegiatan yang belum memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi akan direfocusing. Selain itu dengan adanya implementasi SAKIP maka terdapat keselarasan dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

sampai dengan pelaporan kinerja. Implementasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Banyumas selalu mendapat apresiasi yang baik dari Kementerian PAN dan RB selaku evaluator. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN dan RB yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya. Perolehan hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar 78,46 dengan predikat BB. Perolehan nilai SAKIP ini merupakan nilai tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

4. Penguatan Pengawasan Melalui Pembangunan Zona Integritas

Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya untuk membangun zona integritas di beberapa unit kerja. Sampai tahun 2022, ada 3 (tiga) Perangkat Daerah yang telah memperoleh predikat WBK yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, RSUD Ajibarang dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

5. Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. MPP Kabupaten Banyumas resmi beroperasi pada 18 Januari 2019 dan merupakan MPP pertama di Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2023 MPP Kabupaten Banyumas terdapat 1.538 layanan. Perangkat Daerah yang memberikan layanan di MPP sebanyak 12 (dua belas), instansi vertikal sebanyak 12 (dua belas), BUMD sebanyak 2 (dua), BUMN sebanyak 4 (empat), Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 (dua).

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penguatan Inovasi Pelayanan Publik

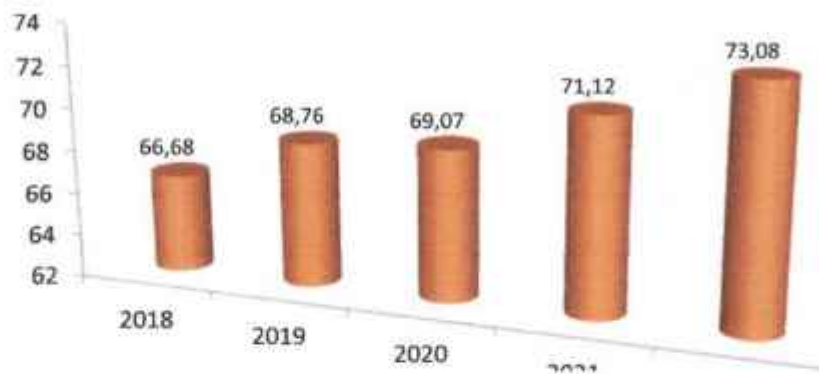
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang bertujuan

agar pengguna layanan merasa puas bahkan bahagia atas pelayanan yang diterima, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan kebijakan adanya 1 (satu) Perangkat Daerah 1 (satu) inovasi. Hal ini dilaksanakan agar setiap terdapat permasalahan dalam pelayanan publik yang dihadapi, maka Perangkat Daerah dapat segera melakukan inovasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul tersebut. Semua inovasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Banyumas tersaji dalam aplikasi SIAPPMAS (Sistem Inovasi Andalan Pelayanan Publik Banyumas). Sampai dengan tahun 2023 jumlah inovasi yang ada sejumlah 276 inovasi. Dari jumlah tersebut terdapat beberapa inovasi yang mendapatkan penghargaan baik di tingkat Kabupaten Provinsi maupun Nasional. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- a) Inovasi yang memperoleh penghargaan tingkat Nasional :
 - 1) Top 45 : Pattas Sosial Mitra Kurir Langit (tahun 2019), PSC 119 (tahun 2021), Sumpah Beruang (tahun 2022).
 - 2) Top 99 : Desa Demit, Saskia Gotak, PSC 119 (tahun 2019), Gendis (tahun 2020), Banyumas Calakan Teacher Training Center (2022).
- b) Inovasi yang memperoleh penghargaan tingkat Provinsi : 2 inovasi yaitu Salinmas dan SIAPPMAS (tahun 2021).
- c) Inovasi yang memperoleh penghargaan tingkat Kabupaten :
 - 1) Tahun 2020 : Gasing, Rinjing Pustaka, Sate Bebek, Si Mas Lawang, Posko Prajamas, Pusaka Santun Lansia, Simantap SLTP, Mama Gercab, Gua CLBK, Mime Six, Shodaqoh Sampah, Gemas Pesulan, Gerdu Nakita, Gendis, Tata Kelola Penilaian Menggunakan Mas-Cerdic Untuk Meningkatkan Prestasi Sekolah, Perdukesima, Kampel, Manajemen Penilaian Sekolah Menggunakan Mas-War Untuk Meningkatkan Prestasi Peserta Didik di SMPN 2 Purwokerto, Ambyar Ia Mas.
 - 2) Tahun 2021 : Bunda Rumah Tangga Siaga Bencana, Denmas Slamet, Jedul, Kerak telur, Lakaemas, Lipstik Cantik, Marsilati, Mas Sultan.
 - 3) Tahun 2022 : Kerak telur, Laso Mas War, Komunitas Asem Pecel, Wis Ora Kencot, Satria Trengginas, Lakon Gaman Kembar, Siap Ceria Dengan Anjungan Mandiri, KMS Bawor, Si Doi Mas, Ambyar Ia Mas.

Selain hal tersebut diatas, progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan Pemerintah Daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Grafik 2.1. disajikan nilai Indeks RB selama 5 (lima) tahun terakhir.

Nilai RB Kabupaten Banyumas
Tahun 2018 – 2022



Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2023

Berdasarkan grafik diatas, nilai Indeks Reformasi Pemerintah Kabupaten Banyumas selama 5 (lima) tahun mengalami kenaikan. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 Pemerintah Kabupaten memperoleh predikat BB dan merupakan nilai tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Dari grafik di atas terlihat bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah menuju ke arah yang lebih baik yang dibuktikan dengan kondisi eksisting. Namun demikian masih perlu dilakukan peningkatan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengimplementasikan berbagai program Reformasi Birokrasi yang tergambar melalui hasil pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Meskipun hasil evaluasi RB selalu mengalami peningkatan, namun masih terdapat rekomendasi untuk perbaikan implementasi RB. Pada evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2022, ada beberapa rekomendasi

yang harus di tindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, yaitu :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi agen perubahan terutama di perangkat daerah supaya dapat diketahui perubahan yang berhasil diciptakan.
2. Mendorong pemerintah kabupaten banyumas untuk melakukan pemetaan atas dampak dari kebijakan yang ditetapkan/*Regulatory Impact Analysis* (RIA) agar dapat menjamin efektifitas dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun.
3. Melakukan penyesuaian SOP sesuai dengan peta proses bisnis baru serta melakukan evaluasi untuk memastikan proses kerja dapat berjalan secara optimal.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi pada *masterplan smart city* kabupaten banyumas sehingga pengembangan berbagai sistem (*hardware* dan *software*) dapat lebih efektif, efisien dan terintegrasi sehingga mampu mewujudkan kabupaten banyumas sebagai *smart governance*.
5. Menerapkan sistem merit secara keseluruhan, salah satunya dengan melakukan *assesment* kepada seluruh pegawai untuk kemudian dapat mengoptimalkan *talent pool* yang telah di buat dan dimanfaatkannya sebagai dasar penentuan pola karir dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi.
6. Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas di unit kerja sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan dan sistem integrasi.
7. Mengoptimalkan peran APIP sebagai *quality assurance and consulting* kaitanya dengan keuangan dan kinerja.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIAPMas dalam memonev efektifitas berbagai aplikasi yang ada, selain itu hasil dari monev tersebut harus dipastikan tindaklanjutnya.

Seluruh rekomendasi diatas harus di tindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan harapan dengan ditindalnjutinya rekomendasi tersebut maka dapat berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas dan meningkatnya layanan masyarakat secara prima.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

A. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN RB

Permasalahan utama implementasi RB selama beberapa tahun terakhir adalah RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator utama daerah, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* RB Nasional tahun 2022-2026 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* RB Nasional tahun 2022-2026 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap pembangunan, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.. Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi yang fokus untuk mempertajam tujuan, sasaran, dan indikator agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Logis Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Nasional Setelah Penajaman



Sumber : Kementerian PANRB, 2023

Berdasarkan Kerangka logis tersebut diatas, maka terdapat Perubahan Tujuan dan Sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2023–2024, sebagai berikut :

1. Tujuan RB

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB Kabupaten Banyumas tahun 2019- 2023 sebelum penajaman adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB Kabupaten Banyumas tahun 2023-2024 setelah penajaman adalah **“Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”**. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Daerah yang akan mendukung Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Kabupaten Banyumas dibanding dengan kabupaten lainnya, sehingga dapat menambah daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

2. Sasaran RB

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB tahun 2018-2023 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, dan meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik. Pada *Road Map* RB tahun 2023-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

a. **Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, dan akuntabel sebagai aspek hard element.**

Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan

sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tatakelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

b. **Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element.**

Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

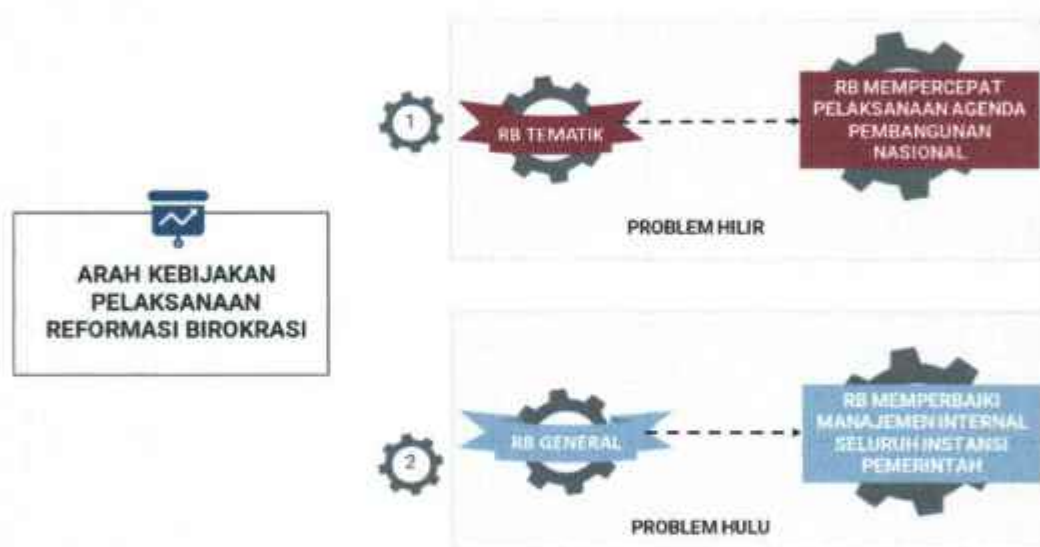
Pada *Road Map* RB tahun 2022-2026 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* RB tahun 2023-2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

4. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan RB

Ekspektasi masyarakat dan dunia usaha atas pelaksanaan RB adalah

menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB tahun 2023–2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

Gambar 3.2. *Double Track* Fokus Pelaksanaan RB



Sumber : Kementerian PAN RB, 2023

B. PERENCANAAN RB GENERAL

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan RB secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan RB oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading institution. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan

monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut TRBN. Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing pemerintah daerah serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan masing-masing pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut :

Gambar 3.3. Kerangka Logis Indikator Kinerja Setelah Penajaman



Sumber: Kementerian PANRB, 2023

Reformasi Birokrasi General fokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

General terfokus mempercepat tercapainya sasaran strategis *Road Map* Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi setelah penajaman secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal tersebut di level mikro, terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi General, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi internal.

1. Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General

Kegiatan utama Reformasi General Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kabupaten Banyumas

Kegiatan Utama	Indikator
Sasaran Strategis 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibilitas dengan baik
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	MPP Digital
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang Memperoleh Predikat WBK/ WBBM pada tahun berjalan
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat

Kegiatan Utama	Indikator
Sasaran Strategis 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Reformasi Hukum
Pelaksanaan Arsip Digital	Kualitas Pengelolaan Arsip
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sasaran Strategis 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	
Penataan Jabatan Fungsional	Sistem Merit
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Sistem Merit
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Sistem Merit
Penguatan Sistem Merit	Sistem Merit
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik
	Nilai SKM
	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

2. Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General

Penetapan Target ini perlu memperhatikan target minimal *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Pemerintah

Kabupaten Banyumas sebagaimana pada tabel berikut :
Tabel 3.2. Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Tahun
2023-2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseli ne	Target	
			2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel					
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transfor masi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi/transf ormasi organisasi berbasis kinerja dan agile	%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibilitas dengan baik	%	0	50%	100%
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,60	3,3	3,5
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	Nilai	78,46	79	79,5

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	MPP Digital	%	0	100%	100%
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang Memperoleh Predikat WBK/ WBBM pada tahun berjalan	Perangkat Daerah	3	4	4
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP	Nilai	3,029	3,050	3,075
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat	%	100%	100%	100%
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	80,33	80,40	80,45
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	Indeks	0	70	70,5
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Reformasi Hukum	Nilai	68,85	70	70,5
Pelaksanaan Arsip Digital	Nilai Penagwasan	Nilai	64,35	62	63

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
	Arsip Eksternal				
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata	%	100%	100%	100%
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	50,40	55	60
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	%	97	96,1	96,5
Sasaran Strategis 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional					
Penataan Jabatan Fungsional	Sistem Merit	Indeks	189,50	250	252
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Sistem Merit	Indeks	189,50	250	252
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Sistem Merit	Indeks	189,50	250	252
Penguatan Sistem Merit	Sistem Merit	Indeks	189,50	250	252
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	Indeks	64,0	65	66
Pelaksanaan	Indeks Persepsi	Indeks	96,50	96,75	97

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
Pelayanan Publik Prima	Kualitas Pelayanan Publik				
	Nilai SKM	Nilai	86,15	86,50	86,75
	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	Nilai	95,01	95,50	96

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

3. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General

Rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi instansi. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	100%	Tersedianya kebijakan penyederhanaan birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile pada pemerintah daerah	Evaluasi kebijakan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja	Dokumen	Hasil Evaluasi kebijakan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja	1	Rp60.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
						TW III				
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah	Pembentukan Tim dan instrumen monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi	Dokumen	SK Tim dan instrumen monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi	1	Rp. 130.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi	Dokumen	Hasil monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi	1 TW IV	Rp. 130.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibilitas dengan baik	50%	Tersedianya kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (transformasi <i>squad model</i>) pada Instansi Pemerintah	Penyusunan Draft Perbup Mekanisme Sistem Kerja	Dokumen	Jumlah Draft Perbup Mekanisme Sistem Kerja	1 TW IV	Rp. 0	Bagia Organisasi Setda	Bagia Organisasi Setda
			Tersedianya kebijakan terkait Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah	Rakor terkait kebijakan Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah	Dokumen	Laporan hasil rakor kebijakan terkait Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah	1 TW IV	Rp. 130.000.000	Bagia Organisasi Setda	Bagia Organisasi Setda
			Tersedianya kebijakan model jabatan fungsional baru (<i>job family based on competence domain</i>)	Evaluasi Perbup Pola Karier	Dokumen	Laporan hasil evaluasi Perbup Pola Karier	1 TW IV	Rp. 477.393.553	BKPSDM	BKPSDM
			Tersedianya kebijakan terkait sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi	Rapat koordinasi terkait dengan sistem kerja baru	Kegiatan	Jumlah kegiatan Rapat koordinasi terkait dengan	1 TW IV	Rp. 130.000.000	Bagia Organisasi Setda,	Bagia Organisasi Setda,

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
			pegawai ASN	dengan model fleksibel bagi pegawai ASN (<i>flexitime</i>)		sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN (<i>flexitime</i>)			BKPSDM	BKPSDM
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,3	Tersedianya kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Penyusunan SK Bupati tentang Arsitektur SPBE	Dokumen	Jumlah SK Bupati tentang Arsitektur SPBE	1	Rp. 0	Bagian Organisasi Setda, Dinkominfo	Bagian Organisasi Setda, Dinkominfo
							TW II			
				Penyusunan pedoman tentang manajemen pengetahuan SPBE	Dokumen	Pedoman tentang manajemen pengetahuan SPBE	1	Rp. 0	Bappedalitbang, Bagian Organisasi	Bappedalitbang, Bagian Organisasi
							TW II			
				Penyusunan Perbup tentang pedoman manajemen keamanan informasi SPBE	Dokumen	Perbup tentang pedoman manajemen keamanan informasi SPBE	1	Rp. 0	Dinkominfo, Bagian Organisasi Setda	Dinkominfo, Bagian Organisasi Setda
							TW IV			
				Penyusunan Perbup tentang standar teknis dan prosedur audit TIK	Dokumen	Perbup tentang standar teknis dan prosedur audit TIK	1	Rp. 25.000.000	Dinkominfo	Dinkominfo
							TW IV			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
			Terlaksananya inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional yang ditargetkan dalam kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE, sebagai penyelenggara SPBE	Kegiatan	Jumlah kegiatan Penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE, sebagai penyelenggara SPBE	5 TW II : 2 TW III : 3	Rp. 38.350.000	Bagian Organisasi, Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
				Implementasi program <i>Smart City</i>	Dokumen	Laporan Hasil Implementasi program <i>Smart City</i>	1 TW IV	Rp. 180.000.000	Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
			Tersedianya kebijakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, kinerja dan pelaporan (<i>collaborative working</i>) berbasis teknologi informasi	Pengembangan aplikasi e-SAKIP	Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengembangan aplikasi e-SAKIP	1 TW II	Rp. 500.000,-	Bagian Organisasi Setda, Dinkominfo	Bagian Organisasi Setda, Dinkominfo
				Penyusunan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang SAKIP, PK, IKU	Dokumen	Jumlah Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang SAKIP, PK, IKU	1 TW II	Rp. 0	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	79	Tersedianya kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Kebijakan Pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah pedoman Pemberian penghargaan	1 TW IV	Rp. 0	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
						kepada Perangkat Daerah dengan implementasi SAKIP terbaik				
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi, yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Pemkab dan Perangkat Daerah melalui aplikasi e-SAKIP, e-Monev, dan Jegos	Kegiatan	Jumlah kegiatan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Pemkab melalui aplikasi e-SAKIP, e-Monev, dan Jegos	3 TW I : 3 TW II : 3 TW III: 3 TW IV : 3	Rp. 110.000.000	Bagian Organisasi Setda, Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Bappedalitbang	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,3	Tersedianya Kebijakan Pelayanan Publik Digital	Rakor Impelementasi Pelayanan Publik Digital	Kegiatan	Jumlah Rakor Impelementasi Pelayanan Publik Digital	2 TW III	Rp. 184.840.000	DPMPTSP	Seluruh Perangkat Daerah
				Identifikasi Pelayanan Perijinan Digital	Dokumen	Laporan hasil Identifikasi Pelayanan Perijinan Digital	1 TW IV	Rp. 0	DPMPTSP	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	4 Perangkat Daerah	Terlaksananya pembangunan zona integritas kawasan dan sektor strategis	Melakukan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	4	Rp 21.000.000	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
							TW II : 2			
							TW III : 2			
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan zona integritas kawasan dan sektor strategis	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monev pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	3 IV : 3	Rp 6.835.000	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP	3,050	Terlaksananya penguatan SPIP	Melakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi implementasi SPIP trtintegrasi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi implementasi SPIP trtintegrasi	29		Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Inspektorat Daerah, Bappedalitbang	Seluruh Perangkat Daerah
							TW II			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan SPIP	Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan SPIP	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan SPIP	29 TW III	Rp9.650.000	Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Inspektorat Daerah, Bappedalitbang	Seluruh Perangkat Daerah
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat	100%	Terlaksananya kolaborasi peningkatan kualitas tindak lanjut pengaduan masyarakat berbasis TI	Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan masyarakat	Kegiatan	Jumlah kegiatan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan masyarakat	16 TW I : 5 TW II: 3 TWIII : 2 TW IV : 6	Rp. 13.200.000	Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
				Rapat koordinasi terkait penanganan pengaduan masyarakat			1 TW IV			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan (LAPOR)	Pembentukan Tim dan instrumen monitoring dan evaluasi pengaduan (LAPOR)	Dokumen	Jumlah SK Tim dan instrumen monitoring dan evaluasi pengaduan (LAPOR)	1	Rp. 0	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengaduan (LAPOR)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengaduan (LAPOR)	Dokumen	Laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengaduan (LAPOR)	1	Rp. 0	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	SPI	80,4	Terlaksananya Survei Penilaian Integritas	Sosialisasi SPI dan evaluasi hasil SPI tahun sebelumnya	Kegiatan	Jumlah kegiatan Sosialisasi SPI dan evaluasi hasil SPI tahun sebelumnya	1	Rp 9.312.000	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
							TW II : 1			
				Penyusunan data objek survei penilaian integritas tahun berjalan	Dokumen	Jumlah dokumen data objek survei penilaian integritas tahun berjalan	1	Rp. 0	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
							TW III			
			Monitoring pelaksanaan SPI tahun berjalan	Dokumen	Hasil Monitoring pelaksanaan SPI tahun berjalan		1	Rp 6.000.000	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	70	Terlaksananya tata kelola kebijakan yang baik (<i>evidence based policy</i>)	Penyusunan SE Pedoman Penyusunan Produk	Dokumen	SE Pedoman Penyusunan Produk Hukum	1	Rp. 0	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
						Daerah	TW IV			
				Hukum Daerah						
				Rapat Koordinasi penyusunan tata kelola kebijakan publik	kegiatan	Jumlah rapat Koordinasi penyusunan tata kelola kebijakan publik	1 TW IV	Rp. 750.000		
				FGD penyusunan kebijakan publik daerah	kegiatan	FGD penyusunan kebijakan publik daerah	1 TW IV	Rp. 750.000		
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Reformasi Hukum	70	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik	Pegusulan propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah)	dokumen	Daftar usulan raperda untuk menjadi propemperda kepada Bupati	1 TW IV	Rp.0	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Rapat sosialisasi propemperda	kegiatan	Jumlah Rapat sosialisasi propemperda	1 TW IV	Rp.0		
				Pengusulan keputusan Bupati tentang Propemperbup	dokumen	Daftar usulan raperbup untuk menjadi propemperbup dalam keputusan Bupati	1 TW IV	Rp.0		

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
				Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah/Perbup yang akan disusun atau diajukan pembahasan	Dokumen	Laporan Hasil Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah/Perbup yang akan disusun atau diajukan pembahasan	1	Rp.0		
				TW IV						
				Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Dokumen	Hasil produk hukum daerah yang di fasilitasi	16 TW III : 10 TW IV : 6	Rp. 290.000.000,-		
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	Kegiatan	Jumlah Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	1	Rp. 750.000	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
						TW IV				
Pelaksanaan Arsip Digital	Nilai Pengawasan	62	Tersedianya Kebijakan Arsip Digital	Pembentukan Tim Pembinaan dan	Dokumen	SK Tim Pembinaan dan Pengawasan	2	Rp. 2.385.000	Dinarpusda	Seluruh Perangkat

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
Arsip				Pengawasan Kearsipan		Kearsipan	TW I			Daerah
				Pendampingan pilot proyek Penggunaan Aplikasi Srikandi	PD	PD percontohan Penggunaan Aplikasi Srikandi	8	Rp. 11.782.650	Dinarpusda	Seluruh Perangkat Daerah
							TW I : 8			
				Penguatan penerapan SRIKANDI (Launching Penggunaan Aplikasi Srikandi)	Dokumen	Kebijakan penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas "Intruksi Bupati".	1	Rp. 25.450.650	Dinarpusda	Seluruh Perangkat Daerah
							TW II			
				Pendampingan Penggunaan Aplikasi Srikandi (Bimbingan, Fasilitasi Konsultasi)	Unit Pencipta Arsip / OPD	Jumlah Pencipta Arsip/OPD yang dilakukan pendampingan penggunaan aplikasi SRIKANDI	57	Rp. 8.662.000	Dinarpusda	Seluruh Perangkat Daerah
							TW II : 2			
							TW III : 55			
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kebijakan Arsip Digital	Monitoring dan evaluasi Implementasi SRIKANDI - Sistem	Unit Pencipta Arsip /	Jumlah Pencipta Arsip/OPD yang dilakukan monev penggunaan	57	Rp. 0	Dinarpusda	Seluruh Perangkat Daerah
							TW III : 57			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					OPD.	aplikasi SRIKANDI				
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata	100%	Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan data statistik sektoral	Penyusunan SK Pengelola Data di setiap Perangkat Daerah dan SK Pendamping Pengelola Data	Dokumen	Jumlah SK Pengelola Data dan SK Pendamping Pengelola Data	30	Rp. 0	Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
							TW I			
				Melaksanakan pelatihan statistik untuk Pengelola Data oleh Tim Pendamping	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pelatihan statistik pengelolaan data	29	Rp. 12.500.000	Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
							TW I : 29 TW IV : 29			
			Teriaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral	Melaksanakan Forum Satu Data untuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral	Kegiatan	Jumlah Rakor Forum Data untuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral	6	Rp. 11.660.000	Dinkominfo , Bappedalitbang	Seluruh Perangkat Daerah
							TW I: 1 TW II : 2 TW III : 1 TW IV : 2			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	55	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Orang	Jumlah Pelaku Pengadaan OPD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	112 TW IV	Rp. 119.998.000,-	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Pendampingan/Sosialisasi Pelaksanaan e-Purchasing (e-Katalog)	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pendampingan e-Katalog	160 TW I : 40 TW II : 40 TW III : 40 TW IV : 40			
				Pendampingan/Asistensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (Rencana Umum Pengadaan)	OPD/UPT	Jumlah OPD/UPT yang mendapatkan pendampingan/Asistensi	130 TW II	Rp. 0	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan	Pelaksanaan monitoring dan	Dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi	1 TW IV		Bagian Layanan	Seluruh Perangkat

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
						pelaksanaan pengadaan barang dan jasa			Pengadaan Barang/Jasa Setda	Daerah
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset yang baik	Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi keuangan dan aset	Dokumen	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan	4	Rp120.450.200	BKAD	Seluruh Perangkat Daerah
							TW I : 1			
							TW II : 1			
							TW III : 1			
							TW IV : 1			
					Dokumen	Jumlah laporan rekonsiliasi aset	4	Rp. 26.924.000	BKAD	Seluruh Perangkat Daerah
							TW I : 1			
							TW II : 1			
							TW III : 1			
							TW IV : 1			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset	Dokumen	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan	1	Rp 118.563.700	BKAD	Seluruh Perangkat Daerah
							TW III			
					Dokumen	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi inventarisasi BMD	2	Rp435.000.000	BKAD	Seluruh Perangkat Daerah
							TW III : 1			
							TW IV:1			
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	96,1%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Dokumen	Berita Acara Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	2	Rp. 268.602.000	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
							TW II			
							TWIV			
Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	250	Tersedianya kebijakan penataan jabatan fungsional ASN	Penetapan Perangkat Daerah selaku pembina teknis jabatan fungsional lingkup Pemerintah Kabupaten	Dokumen	Surat Penetapan Perangkat Daerah selaku pembina teknis jabatan fungsional lingkup Pemerintah Kabupaten	1	Rp. 35.938.500	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
				Penyusunan kebijakan kebutuhan jabatan fungsional	Dokumen	SK kebutuhan jabatan fungsional	1 TW III	Rp 20.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	1 TW IV	Rp. 35.938.500	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Indeks Sistem Merit	250	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen talenta ASN	Penyusunan Perbup tentang manajemen talenta ASN	Dokumen	Jumlah Perbup tentang manajemen talenta ASN	1 TW I	Rp.477.393.553	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Indeks Sistem Merit	250	Tersedianya kebijakan kesejahteraan ASN	Penyusunan/evaluasi Perbup TPP	Dokumen	Jumlah Perbup TPP	1 TW IV	Rp. 35.938.500	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN	Pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN	Dokumen	Laporan rekapitulasi capaian kinerja pegawai ASN	1 TW IV	Rp. 35.938.500	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN dan pengelolaan kinerja pegawai ASN	Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN	1 TW IV

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
						dan pengelolaan kinerja pegawai ASN				
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	250	Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan implementasi sistem merit dan sistem manajemen ASN	Menyusun perbup tentang <i>talent pool</i>	Dokumen	Perbup tentang <i>Talent Pool</i>	1	Rp. 477.393.553	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			
				Pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas	Dokumen	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas	1	Rp.2.019.265.267	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			
				Pemetaan kebutuhan kompetensi sesuai bidang tugas	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pemetaan kebutuhan kompetensi sesuai bidang tugas yang disusun	1	Rp. 2.019.265.267	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			
				Menyusun dokumen analisis kesenjangan kompetensi	Dokumen	Jumlah dokumen analisis kesenjangan kompetensi (pendidikan) yang disusun	1	Rp. 2.019.265.267	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	65	Terlaksananya Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks BerAKHLAK	Penilaian mandiri sistem merit	Dokumen	Jumlah dokumen penilaian mandiri sistem merit yang disusun	1	Rp. 477.393.553	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			
							1	Rp. 0	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
							TW III			
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	65	Terlaksananya Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks BerAKHLAK	Penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks BerAKHLAK	Dokumen	SE pelaksanaan Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks BerAKHLAK	1	Rp. 0	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
							TW III			
				Penyusunan laporan terkait pelaksanaan Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks BerAKHLAK	Dokumen	Laporan hasil pelaksanaan Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks BerAKHLAK	1	Rp. 0	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
							TW III			
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	65	Terlaksananya Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks BerAKHLAK	Internalisasi budaya kerja ASN BerAKHLAK	Kegiatan	Kegiatan Internalisasi budaya kerja ASN BerAKHLAK	1	Rp 3.000.000	Bagian Organisasi Setda, BPKSDM	Seluruh Perangkat Daerah
							TW II			
				Internalisasi budaya kerja ASN BerAKHLAK	Kegiatan	Kegiatan Internalisasi budaya kerja ASN BerAKHLAK	1	Rp 3.000.000	Bagian Organisasi Setda, BPKSDM	Seluruh Perangkat Daerah
							TW II			
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	96.75	Terbangunnya Manajemen Pengetahuan (<i>Knowledge Management</i>) Pelayanan	Pelaksanaan sosialisasi pendampingan	Kegiatan	Jumlah kegiatan Pelaksanaan sosialisasi	4	Rp 11.100.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2023	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2023	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
			Publik	terkait kebijakan pelayanan publik (FKP,SKM, SP, Inovasi Pelayanan Publik)		pendampingan terkait kebijakan pelayanan publik (FKP,SKM, SP, Inovasi Pelayanan Publik)	TW II : 1 TW I : 3			
	Nilai SKM	86,5	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen	Jumlah laporan Survei Kepuasan Masyarakat	2 TW II: 1 TW IV : 1	Rp 5.650.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	95,5	Terlaksananya Evaluasi atas Kepatuhan Standar Pelayanan pemerintah daerah	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Dokumen	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	1 TW III	Rp. 0	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap budaya Pelayanan Prima pada seluruh	Pelaksanaan monev SKM seluruh UPP	Dokumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan monev SKM seluruh UPP	2 TW II : 1 TW IV	Rp. 0	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama daerah	Rencana Aksi kebijakan penyederhanaan birokrasi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
						penyederhanaan birokrasi	TW III			
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibilitas dengan baik	100%	Tersedianya kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (transformasi <i>squad model</i>) pada Instansi Pemerintah	Evaluasi kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (transformasi <i>squad model</i>) pada Instansi Pemerintah	Dokumentasi	Jumlah laporan hasil Evaluasi kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (transformasi <i>squad model</i>) pada Instansi Pemerintah	1	Rp. 261.500.000	Bagia Organisasi Setda	Bagia Organisasi Setda
							TW IV			
			Tersedianya kebijakan terkait Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah	Rakor terkait kebijakan Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah	Dokumentasi	Laporan hasil rakor kebijakan terkait Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah	1	Rp. 261.500.000	Bagia Organisasi Setda	Bagia Organisasi Setda
							TW II			
				Penyusunan/Evaluasi terkait kebijakan Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah	Dokumentasi	Jumlah kebijakan terkait Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah	1	Rp. 261.500.000	Bagia Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
							TW II			
			Tersedianya sistem	Pengembangan	Aplikasi	Aplikasi SIMPATIK	1	Rp. 330.000.000	BKPSDM	Seluruh

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					si	dengan mempertimbangkan sistem mekanisme kerja baru	TW III			Perangkat Daerah
			informasi yang mendukung kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	aplikasi SIMPATIK dengan mempertimbangkan sistem mekanisme kerja baru						
			Tersedianya kebijakan terkait sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Kebijakan terkait dengan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN (<i>flexitime</i>)	Dokumen	Jumlah Kebijakan tentang Sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN (<i>flexitime</i>)	1 TW II	Rp. 261.500.000	Bagia Organisasi Setda, BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				Pengembangan aplikasi SIMPATIK dengan model fleksibel bagi pegawai ASN (<i>flexitime</i>)	Aplikasi	Aplikasi SIMPATIK dengan model fleksibel bagi pegawai ASN (<i>flexitime</i>)	1 TW III	Rp. 330.000.000	BKPSDM, Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Pembentukan Tim dan instrumen monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca	Dokumen	Jumlah SK Tim dan instrumen monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca	1 TW I	Rp. 330.000.000	BKPSDM	BKPSDM

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
					n					
				penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN		penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN				
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil monitoring dan evaluasi kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	1 TW III	Rp. 330.000.000	Bagia Organisasi Setda, BKPSDM	Bagia Organisasi Setda, BKPSDM
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,5	Tersedianya kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Evaluasi Perbup SPBE	Dokumen	Perbup SPBE	1 TW I	Rp. 50.000.000	Bagian Organisasi Setda, Dinkominfo	Bagian Organisasi Setda, Dinkominfo
				Evaluasi Perbup tentang pedoman	Dokumen	Perbup tentang pedoman	1	Rp. 25.000.000	Dinkominfo , Bagian	Dinkominfo , Bagian

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
						manajemen keamanan informasi SPBE	TW IV		Organisasi Setda	Organisasi Setda
				Evaluasi Perbup tentang standar teknis dan prosedur audit TIK	Dokumen	Perbup tentang standar teknis dan prosedur audit TIK	1 TW IV	Rp. 25.000.000	Dinkominfo	Dinkominfo
				Penyusunan Perbup tentang standar teknis dan prosedur audit TIK	Dokumen	Perbup tentang standar teknis dan prosedur audit TIK	1 TW IV	Rp. 25.000.000	Dinkominfo	Dinkominfo
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Arsitektur SPBE oleh Tim Koordinasi SPBE	Kegiatan	Jumlah kegiatan rapat kordinasi	2 TW I: 1 TWII: 1	Rp. 50.000.000	Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	79,5	Tersedianya kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Penyusunan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang SAKIP, PK, IKU	Dokumen	Jumlah Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang SAKIP, PK, IKU	1 TW II	Rp. 0	Bagian Organisasi Setda, Dinkominfo	Bagian Organisasi Setda, Dinkominfo
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi	Monitoring dan evaluasi capaian	Kegiatan	Jumlah kegiatan Monitoring dan	12	Rp. 261.500.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
			kebijakan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi, yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	kinerja Pemkab dan Perangkat Daerah melalui aplikasi e-SAKIP, e-Monev, dan Jegos		evaluasi capaian kinerja Pemkab melalui aplikasi e-SAKIP dan e-Monev, dan Jegos	TW I: 3 TW II : 3 TW III : 3 TWIV: 3		Setda, Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Bappedalitbang	Setda, Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Bappedalitbang
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,5	Tersedianya Kebijakan Pelayanan Publik Digital	Rakor Impelementasi Pelayanan Publik Digital	Kegiatan	Jumlah Rakor Impelementasi Pelayanan Publik Digital	2	Rp. 224.500.000	DPMPTSP	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			
				Identifikasi Pelayanan Perijinan Digital	Dokumen	Laporan hasil Identifikasi Pelayanan Perijinan Digital	1	Rp. 224.500.000	DPMPTSP	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			
				Penyusunan SOP pelayanan MPP Digital	Dokumen	Jumlah dokumen SOP pelayanan MPP Digital	1	Rp. 224.500.000	DPMPTSP	Seluruh Perangkat Daerah
							TW III			
				Evaluasi Perbup tata hubungan kerja MPP	Dokumen	Jumlah Perbup tata hubungan kerja	1	Rp. 224.500.000	DPMPTSP	Seluruh Perangkat

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi dan Perbup MPP	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
						MPP dan Perbup MPP	TW IV			Daerah
			Tersedianya MPP digital	Launching MPP Digital	Aplikasi	MPP Digital	1 TW IV	Rp.224.500.000	DPMPTSP	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital dan MPP Digital	Pembentukan Tim dan instrumen monitoring dan evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital dan MPP Digital	Dokumen	SK Tim dan instrumen monitoring dan evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital dan MPP Digital	1 TW IV	Rp. 261.500.000	Bagian Organisasi Setda, DPMPTSP	Seluruh Perangkat Daerah
				Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital dan MPP Digital	Dokumen	Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Digital dan MPP Digital	1 TW IV	Rp. 261.500.000	Bagian Organisasi Setda, DPMPTSP	Seluruh Perangkat Daerah
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan	4 Perangkat	Terlaksananya pembangunan zona integritas kawasan dan	Melakukan Pendampingan Pembangunan Zona	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan	4 TW I : 1	Rp. 353.179.750	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
	Zona Integritas	Daerah	sektor strategis	Integritas Menuju WBK/WBBM	h	Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1			
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan zona integritas kawasan dan sektor strategis	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Perangkat Daerah h	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monev pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	4 TW IV	Rp. 353.179.750	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP	3,075	Terlaksananya penguatan SPIP	Melakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi implementasi SPIP trtintegrasi	Perangkat Daerah h	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi implementasi SPIP trtintegrasi	29 TW III	Rp. 100.000.000,-	Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Inspektorat Daerah, Bappedalitbang	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya monitoring	Melakukan	Perang	Jumlah Perangkat	29	Rp.	Bagian	Seluruh

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
			dan evaluasi kebijakan SPIP	monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan SPIP	kat Daerah	Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan SPIP	TW IV	100.000.000,-	Administrasi Pembangunan Setda, Inspektorat Daerah, Bappedalitbang	Perangkat Daerah
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat	100%	Terlaksananya kolaborasi peningkatan kualitas tindak lanjut pengaduan masyarakat berbasis TI	Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan masyarakat	Kegiatan	Jumlah kegiatan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan masyarakat	4	Rp. 33.600.000	DPMPTSP, Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
							TW I : TW II :1 TW III :1 TW IV :1			
				Rapat koordinasi terkait penanganan pengaduan masyarakat	Kegiatan	Jumlah Rapat koordinasi terkait penanganan pengaduan masyarakat	4 TW IV	Rp. 15.000.000	DPMPTSP, Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan	Pembentukan Tim dan instrumen	Dokumen	Jumlah SK Tim dan instrumen	1		Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama (LAPOR)	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
						monitoring dan evaluasi pengaduan (LAPOR)	TW IV			Daerah
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengaduan (LAPOR)	Dokumen	Laporan hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengaduan (LAPOR)	1 TW IV	Rp. 0	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	80,45	Terlaksananya Survei Penilaian Integritas	Sosialisasi SPI dan evaluasi hasil SPI tahun sebelumnya	Kegiatan	Jumlah kegiatan Sosialisasi SPI dan evaluasi hasil SPI tahun sebelumnya	2 TW II : 1 TW IV : 1	Rp. 25.846.700	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
				Penyusunan data objek survei penilaian integritas tahun berjalan	Dokumen	Jumlah dokumen data objek survei penilaian integritas tahun berjalan	1 TW III	Rp. 25.846.700	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
				Monitoring pelaksanaan SPI tahun berjalan	Dokumen	Hasil Monitoring pelaksanaan SPI tahun berjalan	1 TW IV			
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	70,5	Terlaksananya tata kelola kebijakan yang baik (evidence based policy)	Penyusunan SE Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dokumen	SE Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 TW IV	Rp. 190.000.000,-	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
				Rapat Koordinasi penyusunan tata kelola kebijakan publik	kegiatan	Jumlah rapat Koordinasi penyusunan tata kelola kebijakan publik	1 TW IV	Rp. 190.000.000,-	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				FGD penyusunan kebijakan publik daerah	kegiatan	FGD penyusunan kebijakan publik daerah	1 TW IV	Rp. 190.000.000,-	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Reformasi Hukum	70,5	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik	Pegusulan propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah)	dokumen kegiatan dokumen dokumen	Daftar usulan raperda untuk menjadi propemperda kepada Bupati Jumlah Rapat sosialisasi propemperda	1 TW IV	Rp. 190.000.000,-	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Rapat sosialisasi propemperda	kegiatan	Jumlah Rapat sosialisasi propemperda	1 TW IV	Rp. 190.000.000,-	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Pengusulan keputusan Bupati tentang Propemperbup	dokumen	Daftar usulan raperbup untuk menjadi propemperbup dalam keputusan	1 TW IV	Rp. 190.000.000,-	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
						Bupati				
				Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah/Perbup yang akan disusun atau diajukan pembahasan	Dokumen	Laporan Hasil Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah/Perbup yang akan disusun atau diajukan pembahasan	1 TW IV	Rp. 190.000.000,-	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
				Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Dokumen	Hasil produk hukum daerah yang di fasilitasi	1 TW IV	Rp. 190.000.000,-	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	Pembentukan Tim dan instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	Dokumen	Jumlah SK Tim dan instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	1 TW III	Rp. 80.000.000,-	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	Dokumen	Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan	1 TW IV	Rp. 80.000.000,-	Bagian Hukum Setda	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Arsip Digital	Nilai Pengawasan Arsip	63	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kebijakan Arsip Digital	Monitoring dan evaluasi Implementasi SRIKANDI - Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	Penciptaan Arsip/OPD	Jumlah Penciptaan Arsip/OPD yang melaksanakan aplikasi SRIKANDI	57 TW III	Rp. 45.000.000	Dinarpusda	Seluruh Perangkat Daerah
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata	100%	Tersedianya Kebijakan Penyelenggaraan data statistik sektoral	Penyusunan Petunjuk Teknis dan SOP tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas untuk semua Perangkat Daerah	Dokumen	Petunjuk Teknis dan SOP tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas untuk semua Perangkat Daerah	1 TW II	Rp. 64.614.566	Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
				Melaksanakan pendampingan Pengelola Data oleh Tim Pendamping	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dalam pengelolaan data	29 TW IV	Rp. 64.614.566	Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral	Melaksanakan Forum Satu Data untuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral	Kegiatan	Jumlah Rakor Forum Data untuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan data statistik sektoral	4 TW I : 1 TW II : 1 TW I II : 1 TW IV : 1	Rp. 64.614.566	Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
				Melaksanakan implementasi SDI Kabupaten Banyumas	Dokumen	Laporan Hasil Implementasi SDI Kabupaten Banyumas	1 TW IV	Rp. 64.614.566	Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah
				Melaksanakan pendampingan Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dalam kegiatan EPSS	2 TW III	Rp. 64.614.566	Dinkominfo	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Orang	Jumlah Pelaku Pengadaan OPD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	112	Rp. 27.800.000,-	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			
				Pendampingan/Sosialisasi Pelaksanaan e-Purchasing (e-Katalog)	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pendampingan e-Katalog	160	Rp. 41.250.000,-	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
							TW I : 40			
							TW II : 40			
							TW III : 40			
							TW IV : 40			
				Pendampingan/Asistensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (Rencana Umum Pengadaan)	OPD/UPT	Jumlah OPD/UPT yang mendapatkan pendampingan/Asistensi	130	Rp. 41.250.000,-	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
							TW II			

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1 TW IV	Rp. 0	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda	Seluruh Perangkat Daerah
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset yang baik	Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi keuangan dan aset	Dokumen	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan	4 TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1	Rp 120.000.000	BKAD	Seluruh Perangkat Daerah
					Dokumen	Jumlah laporan rekonsiliasi aset	4 TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1	Rp. 50.000.000	BKAD	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset	Dokumen	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan	1 TW III	Rp 120.000.000	BKAD	Seluruh Perangkat Daerah
					Dokumen	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi inventarisasi BMD	1 TW IV	Rp 550.000.000	BKAD	Seluruh Perangkat Daerah
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	96,5%	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Dokumen	Berita Acara Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	1 TW IV	Rp. 268.602.000	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	252	Tersedianya kebijakan penataan jabatan fungsional ASN	Penetapan Perangkat Daerah selaku pembina teknis jabatan fungsional lingkup Pemerintah Kabupaten	Dokumen	Surat Penetapan Perangkat Daerah selaku pembina teknis jabatan fungsional lingkup Pemerintah Kabupaten	1 TW IV	Rp. 60.000.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
				Penyusunan kebijakan kebutuhan	Dokumen	SK kebutuhan jabatan fungsional	1	Rp. 130.000.000,-	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
				jabatan fungsional					Setda	Daerah
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi implementasi penataan jabatan fungsional ASN	1 TW IV	Rp. 60.000.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Indeks Sistem Merit	252	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen talenta ASN	Penyusunan Perbup tentang manajemen talenta ASN	Dokumen	Jumlah Perbup tentang manajemen talenta ASN	1 TW III	Rp. 1.000.000.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Indeks Sistem Merit	252	Tersedianya kebijakan kesejahteraan ASN	Penyusunan/evaluasi Perbup TPP	Dokumen	Jumlah Perbup TPP	1 TW IV	Rp. 60.000.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN	Pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN	Dokumen	Laporan rekapitulasi capaian kinerja pegawai ASN	1 TW IV	Rp. 60.000.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN dan pengelolaan kinerja pegawai ASN	Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN dan pengelolaan kinerja pegawai ASN	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi implementasi manajemen kesejahteraan ASN dan pengelolaan kinerja pegawai ASN	1 TW IV	Rp. 60.000.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	252	Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan implementasi sistem merit dan sistem manajemen ASN	Menyusun perbup tentang <i>talent pool</i>	Dokumen	Perbup tentang <i>Talent Pool</i>	1	Rp. 1.000.000.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			
				Pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas	Dokumen	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN sesuai bidang tugas	1	Rp. 2.565.000.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			
				Pemetaan kebutuhan kompetensi sesuai bidang tugas	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pemetaan kebutuhan kompetensi sesuai bidang tugas yang disusun	1	Rp. 2.565.000.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			
				Menyusun dokumen analisis kesenjangan kompetensi	Dokumen	Jumlah dokumen analisis kesenjangan kompetensi (pendidikan) yang disusun	1	Rp. 2.565.000.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
							TW IV			
			Terlaksanannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan	Penilaian mandiri sistem merit	Dokumen	Jumlah dokumen penilaian mandiri	1	Rp. 1.000.000.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
			Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN			sistem merit yang disusun	TW IV			Daerah
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	65	Terlaksananya Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks BerAKHLAK	Penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks BerAKHLAK	Dokumen	SE pelaksanaan Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks BerAKHLAK	1	Rp. 130.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
							TW III			
				Penyusunan laporan terkait pelaksanaan Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks BerAKHLAK	Dokumen	Laporan hasil pelaksanaan Survei Nilai <i>Employer Branding</i> dan Indeks BerAKHLAK	1	Rp. 130.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
							TW III			
				Internalisasi budaya kerja ASN BerAKHLAK	Kegiatan	Kegiatan Internalisasi budaya kerja ASN BerAKHLAK	1	Rp. 130.000.000	Bagian Organisasi Setda, BPKSDM	Seluruh Perangkat Daerah
							TW II			
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	96.75	Terbangunnya Manajemen Pengetahuan (<i>Knowledge Management</i>) Pelayanan Publik	Pelaksanaan sosialisasi pendampingan terkait kebijakan	Kegiatan	Jumlah kegiatan Pelaksanaan sosialisasi pendampingan	2	Rp. 130.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Output Utama	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian		Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	2024	Jumlah Anggaran (Rp)	Koordinator	Pelaksana
				pelayanan publik (FKP,SKM, SP, Inovasi Pelayanan Publik)		terkait kebijakan pelayanan publik (FKP,SKM, SP, Inovasi Pelayanan Publik)	TW III			
	Nilai SKM	86,50	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen	Jumlah laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1 TW II	Rp. 130.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan	95,50	Terlaksananya Evaluasi atas Kepatuhan Standar Pelayanan pemerintah daerah	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Dokumen	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	1 TW III	Rp. 130.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
			Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap budaya Pelayanan Prima pada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah	Pelaksanaan monev SKM seluruh UPP	Dokumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan monev SKM seluruh UPP	1 TW IV	Rp. 130.000.000	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah

C. PENETAPAN TEMA DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Melalui RB Tematik, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB tahun 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan.
2. Peningkatan Investasi. RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*).
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital.
4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Dari 4 (empat) tema RB Tematik, Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan tema RB sebagai berikut :

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Peningkatan investasi;
3. Digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting;
4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); dan
5. Pengendalian inflasi.

Tabel 3.5. Penetapan Tema Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2024

Tema	Sasaran	Indikator	Kondisi Eksisting	Target	
				2023	2024
Pengentasan kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Prosentase penduduk miskin	12,84%	11,00	10,90

Tema	Sasaran	Indikator	Kondisi Eksisting	Target	
				2023	2024
Peningkatan investasi	Meningkatnya nilai investasi daerah	Jumlah Investasi Daerah	Rp. 927.730.284.430	1 T	1 T
Digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting	Menurunnya angka stunting	Prevalensi stunting	16,6	15	14
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	74,79%	50%	50%
Pengendalian inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Laju Inflasi	3,25%	3±1%	2,5±1 %

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

D. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi instansi. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dalam tabel berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan

Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.1 Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Permasalahan Meminimalkan Kantong Kemiskinan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	RENCANA AKSI	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran Perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Meminimalkan Kantong Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	73.93	PIS PK	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	23240	22903	36928	36929	terkait	180.000.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
				Skrining ODMK di Posbindu, Sekolah dan fasilitas umum lainnya.	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	3586	6213	100	101	terkait	56.250.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Tes urin dan Asist di sekolah dan instansi	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	22	6	6	6	terkait	15.000.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	16	16	16	16	terkait	1.125.926.810	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				BPJS bagi masyarakat miskin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	62136	62972	65224	65224	terkait	34.797.704.410	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBS rumah tangga dan institusi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Keluarga	118550	237100	75000	43547	terkait	40.000.000	DINKES	Bidang Kesehatan Masyarakat

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	RENCANA AKSI	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran Perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				pendidikan	Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									at
	Meningkatnya ketersediaan pangan secara mandiri	Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP		Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun	Unit	0	0	0	6	terkait	5.217.100.000	DINPERTA N KP	DINPERTAN KP
				Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	Unit	0	0	0	12	terkait	8.210.000.000	DINPERTA N KP	DINPERTAN KP
				Penyediaan infrastruktur cadangan pangan pemerintah (CPPD)	Jumlah infrastruktur cadangan pangan pemerintah yang tersedia	Unit	0	0	0	0	terkait		DINPERTA N KP	DINPERTAN KP
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	0,25	0,25	0,25	0,25	terkait	2.701.508.640	DPU	Bidang SDA & Irigasi
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km			0,1	0,1	terkait	2.014.823.140	DPU	Bidang SDA & Irigasi
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah bangunan penampung air baku terbangun	Unit				1	terkait	7.615.373.000	DPU	Bidang SDA & Irigasi

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	RENCANA AKSI	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran Perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana wilayah	Indeks daya saing infrastruktur	3,5	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km			10	19	terkait	44.804.950.000	DPU	DPU
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km				25	terkait	19.163.187.605	DPU	DPU
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km				1	terkait	21.247.850.000	DPU	DPU
				Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Unit/Jembatan				2	terkait	1.115.000.000	DPU	DPU
				Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan kondisi rusak ringan yang direhab	Unit/Jembatan				4	terkait	640.000.000	DPU	DPU
	Meningkatkan Kualitas Permukiman	(2023) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	77,58%	Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah			300		terkait	7.295.000.000	DINPERKIM	Swakelola
	Meningkatkan Cakupan Infrastruktur Pelayanan	Persentase jumlah rumah tangga yang	77	Melakukan Supervisi dan perencanaan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optima	Dokumen				4	terkait	415.000.000	DINPERKIM	Swakelola Masyarakat / KSM

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	RENCANA AKSI	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran Perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
	Dasar	mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota (Ind. Program 2023)			lisasi SPAM									
				Melakukan pembangunan SPAM (reservoir/sumur bor)	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR				330	terkait	3.030.000.000	DINPERKIM	Swakelola Masyarakat / KSM
				Melakukan peningkatan jaringan SPAM	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Desa				12	terkait	13.055.821.200	DINPERKIM	Swakelola Masyarakat / KSM
				Memperluas Jaringan SPAM	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR				352	terkait	1.410.000.000	DINPERKIM	Swakelola Masyarakat / KSM
				Melakukan pembinaan terhadap KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) SPAM / (KPSPAM)	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	Penyelenggara SPAM				5	terkait	15.000.000	DINPERKIM	Swakelola Masyarakat / KSM
		(2023) Persentase rumah tinggal	92	Melakukan pembangunan Tangki Septik Individual	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga				2198	terkait	25.075.451.000	DINPERKIM	Swakelola Masyarakat / KSM

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	RENCANA AKSI	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran Perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
		berakses sanitasi (Ind. Program 2023)		Melakukan penyediaan sarana/prasarana penyedotan	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit				2	terkait	951.200.000	DINPERKI M	Swakelola Masyarakat / KSM
				Melakukan jasa penyedotan lumpur tinja / Septiktank	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga				360	terkait	100.000.000	DINPERKI M	Swakelola Masyarakat / KSM
				Pembangunan fasilitas pendukung IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M3/Hari				100	terkait	550.000.000	DINPERKI M	Swakelola Masyarakat / KSM
				Pengurusan IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	M3/Hari				100	terkait	300.000.000	DINPERKI M	Swakelola Masyarakat / KSM
	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	Prosentase desa yang meningkat statusnya	80%	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	0	0	0	1300	terkait	275000000	DINSOS	Bidang PED
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	0	0	0	301	terkait	3789319688	DINSOS	Bidang Bina Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	0	0	0	100	terkait	35000000	DINSOS	Bidang Bina Desa

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	RENCANA AKSI	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran Perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	0	0	0	3	terkait	14000000	DINSOS	Bidang Permas
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	0	0	0	5	terkait	15000000	DINSOS	Bidang Permas
				Pembangunan Ruang Kelas Baru di jenjang SD	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0	0	6	terkait	8.711.871.207	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD
	Meningkatnya derajat pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12.91	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di jenjang SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	93	terkait	6.078.427.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	RENCANA AKSI	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran Perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jenjang SD	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	50	terkait	31.774.417.818	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jenjang SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	8	terkait	1.657.026.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD
				Penambahan Ruang Kelas Baru di jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0	0	7	terkait	1.993.209.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	9	terkait	1.859.518.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	65	terkait	9.439.235.576	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	11	terkait	1.435.767.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.6.2 Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Permasalahan Mengurangi Beban Pengeluaran Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis Kegiatan Aksi*	Jumlah anggaran perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Menurunkan Beban Pengeluaran	Meningkatnya Keterjangkauan Harga Pangan	Nilai Aspek Keterjangkauan Pangan dalam IKP	79,48	Penyediaan bahan pangan/ cadangan pangan untuk desa rawan pangan	Jumlah bahan pangan/ cadangan pangan yang diberikan kepada desa rawan pangan	Paket	0	0	2100	0	terkait	140.700.000	DINPERTAN KP	DINPERTAN KP
				Penerbitan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah registrasi PSAT yang diterbitkan	Dokumen	0	4	4	3	terkait	10.000.000	DINPERTAN KP	DINPERTAN KP
				Pelatihan olahan pangan	Jumlah penerima pelatihan olahan	Orang	0	0	180	0	terkait	55.000.000	DINPERTAN KP	DINPERTAN KP
				Pelatihan pemanfaatan pekarangan	Jumlah penerima pelatihan pemanfaatan pekarangan	Orang	0	0	180	0	terkait		DINPERTAN KP	DINPERTAN KP
				Pelatihan Olahan Pangan	Jumlah keluarga yang menerima pelatihan	Keluarga	0	0	180	0	terkait	60.000.000	DINPERTAN KP	DINPERTAN KP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis Kegiatan Aksi*	Jumlah anggaran perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Meningkatnya derajat pendidikan	Harapan lama sekolah	12,91		Pengadaan Perlengkapan Siswa Jenjang SD (Satu Set : Buku Tulis, Pulpen, dll)	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Peserta Didik	0	0	0	1000	terkait	927.710.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD
				Beasiswa Kartu Banyumas Pintar (KBP) kepada Peserta Didik Jenjang SD	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	0	2980	0	terkait	1.520.000.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD
				Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	811	0	811	0	terkait	119.707.400.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD
				Beasiswa Kartu Banyumas Pintar (KBP) kepada Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	0	0	1482	terkait	1.185.600.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP
	Rata rata lama sekolah	7.55		Pengadaan Perlengkapan Siswa Jenjang SMP	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Peserta Didik	0	0	0	300	terkait	50.000.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Targ et 202 3	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis Kegiat an Aksi*	Jumlah anggaran perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW 1	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	162	0	162	0	terkait	75.974.800.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP
				Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang PAUD	Jumlah Peserta didik PAUD yang Menerima Biaya Personil PAUD	Peserta Didik	0	0	0	3490	terkait	2.095.908.450	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS
				Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1200	0	1200	0	terkait	21.383.356.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS
				Beasiswa Kartu Banyumas Pintar (KBP) kepada Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	0	0	509	terkait	502.000.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS
				Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	43	0	43	0	terkait	6.926.191.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis Kegiatan Aksi*	Jumlah anggaran perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
	Meningkatnya penanganan sosial	Persentase pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	100 %	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0	2	terkait	129.000.000	DINSOS	Bidang PSPFM
				Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	0	0	0	150.000	terkait	487.581.500	DINSOS	Bidang PSPFM
				Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	100	terkait	51.615.250	DINSOS	Bidang PJRS

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis Kegiatan Aksi*	Jumlah anggaran perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
		Persentase pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) ter rehabilitasi	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	0	0	0	300	terkait	347.127.200	DINSOS	Bidang PJRS
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	0	0	0	300	terkait	73.627.000	DINSOS	Bidang PJRS
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kot	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kot	Orang	0	0	0	20	terkait	58.800.000	DINSOS	Bidang PJRS

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis Kegiatan Aksi*	Jumlah anggaran perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				a	a									
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	20	terkait	7.500.000	DINSOS	Bidang PJRS
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	10	terkait	7.392.500	DINSOS	Bidang PJRS
	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,93	Kelas Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan	Orang	5619	5430	6830	6831	terkait	1.857.328.916	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Targ et 202 3	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis Kegiat an Aksi*	Jumlah anggaran perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									
				Rumah Tunggu Kelahiran	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5580	5841	6099	6100	terkai t	1.500.323.700	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
				Pelatihan AMP	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5211	5507	5800	5956	terkai t	1.263.872.059	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
				Pelatihan MTBS	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2432 0	2628 2	2300 0	2482 2	terkai t	493.264.500	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
				Pelaksanaan skrining kesehatan kepada anak Udiskar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	1490 27	1000 00	terkai t	3.772.325.300	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
				Pos pelayanan terpadu usia produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang	Orang	1897 50	1355 59	2390 00	2390 84	terkai t	2.621.146.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis Kegiatan Aksi*	Jumlah anggaran perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									
				Pelaksanaan skrining kesehatan kepada usia lanjut (60 keatas)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6509 9	5654 9	6200 0	6318 8	terkait	8.107.448.800	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
				Pelayanan terpadu PTM di FKTP	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5513 0	3067 3	4300 0	4335 2	terkait	821.028.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Skrining di UKBM	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1276 6	6549	2000	2073	terkait	2.818.428.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Pengelolaan Desa Siaga Sehat Jiwa dan Tim Pembina Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1434	729	436	436	terkait	354.005.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Targ et 202 3	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis Kegiat an Aksi*	Jumlah anggaran perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Masyarakat	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar								
				Skrining orang terduga TB sdh diinput tdk tertampil	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	5683	6377	3000	1540	terkai t	3.230.483.860	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Pemeriksaan/skrining HIV pada populasi khusus dan populasi kunci	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	5455	7252	7898	7899	terkai t	975.544.700	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Skrining ODMK di Posbindu, Sekolah dan fasilitas umum lainnya.	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	3586	6213	100	101	terkai t	56.250.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Tes urin dan Asist di sekolah dan instansi	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	22	6	6	6	terkai t	15.000.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis Kegiatan Aksi*	Jumlah anggaran perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Kesehatan									
				BPJS bagi masyarakat miskin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Orang	62136	62972	65224	65224	terkait	34.797.704.410	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Angkatan Kerja yang Bekerja dengan Pendidikan yang Ditamatkan Minimal SLTA	97%	Menyelenggarakan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	0	25	50	25	terkait	200.000.000	DINNAKERKO PUKM	DINNAKERKO PUKM
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,94	Penanganan kasus terhadap perempuan	Jumlah korban perempuan yang ditangani	orang	13	13	13	13	terkait	100.504.000	DPPKBP3A	DPPKBP3A
				Sosialisasi pemenuhan hak anak	Jumlah sosialisasi pemenuhan hak anak	kegiatan	1	2	2	1	terkait	160.000.000	DPPKBP3A	DPPKBP3A
		Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak	650	Penyediaan data gender dan anak oleh setiap opd	Jumlah OPD yang mengelola data gender dan anak	OPD				29	terkait	7.000.000	DPPKBP3A	DPPKBP3A
	Pertumbuhan Penduduk yang Terkendali	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,77	Pemberian nutrisi bagi ibu hamil resiko tinggi	Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang mendapat pemberian nutrisi	orang	25				terkait	75.000.000	DPPKBP3A	DPPKBP3A

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

[illegible]

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	RENCANA AKSI	Output		Target 2023				Jenis Kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran Perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
	Optimalnya Pengembangan Produk Potensi Ekonomi Daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto Sektor Potensial	45.595 Miliar	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	keluarga	54	0	0	0	terkait	20.000.000	DINNA KERKOPUKM	DINNAKERKOPUKM
				Memfasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	unit usaha				220	terkait	CSR	DINNA KERKOPUKM	DINNAKERKOPUKM
				Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha				30	terkait	CSR	DINNA KERKOPUKM	DINNAKERKOPUKM
				Memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha				200	terkait	CSR	DINNA KERKOPUKM	DINNAKERKOPUKM

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	RENCANA AKSI	Output		Target 2023				Jenis Kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran Perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Angkatan Kerja yang Bekerja dengan Pendidikan yang Ditamatkan Minimal SLTA	97%	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	0	0	64	112	terkait	743.641.800	DINNA KERKOPUKM	DINNAKERKOPUKM
				Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri / wirausaha baru	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	0	190	0	0	terkait	160.000.000	DINNA KERKOPUKM	DINNAKERKOPUKM
				Memfasilitasi kesejahteraan tenaga kerja dengan pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja dan penerimaan upah sesuai UMK	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	1500	0	0	0	terkait	4.500.000	DINNA KERKOPUKM	DINNAKERKOPUKM
	Meningkatnya ketersediaan pangan secara mandiri	Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP	80,98	Pemberian bantuan sarana produksi	Jumlah bantuan sarana produksi yang diberikan kepada Gapoktan/Poktan	Paket	0	0	4	0	terkait	490.900.000	DINPERTAN KP	DINPERTAN KP
				Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT	Jumlah pelaksanaan gerakan pengendalian OPT	Kegiatan	10	10	10	10	terkait	159.000.000	DINPERTAN KP	DINPERTAN KP
				Bimtek pengolahan hasil	Bimtek pengolahan hasil yang dilaksanakan	Kegiatan	2	0	0	0	terkait	25.000.000	DINPERTAN KP	DINPERTAN KP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	RENCANA AKSI	Output		Target 2023				Jenis Kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran Perubahan	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Pelaksanaan sekolah lapang	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	Unit	0	0	0	0	terkait	225.892.000	DINPER TAN KP	DINPERTAN KP
				Pembinaan kelompok nelayan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang				5	terkait	10.000.000	DINKA NNAK	DINKANN AK
				Bimbingan teknis kepada kelompok pembudidaya ikan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok				20	terkait	7.000.000	DINKA NNAK	DINKANN AK
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak	650	Penyediaan data gender dan anak oleh setiap opd	Jumlah OPD yang mengelola data gender dan anak	OPD				29	terkait	terkait	DPPKB P3A	DPPKBP3 A

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.7.1 Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Permasalahan Meminimalkan Kantong Kemiskinan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Meminimalkan Kantong Kemiskinan	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	73.96	PIS PK	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	123900	123900	123900	123903	Terkait	200.000.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
				Skrining ODMK di Posbindu, Sekolah dan fasilitas umum lainnya.	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	67283	67283	67283	67284	Terkait	56.250.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Tes urin dan Assist di sekolah dan instansi	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	24	24	24	24	Terkait	15.000.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	1	2	2	Terkait	1.067.639.310	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				BPJS bagi masyarakat miskin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	1	2	2	Terkait	36.357.328.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBS rumah tangga dan institusi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Keluarga	128875	128875	128875	128875	Terkait	40.000.000	DINKES	Bidang Kesehatan Masyarakat

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				pendidikan	Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									at
	Meningkatnya ketersediaan pangan secara mandiri	Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP	83,43	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun	Unit	0	0	0	10	Terkait	800.000.000	DINPER TAN KP	DINPERTAN KP
				Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	Unit	0	0	0	8	Terkait	800.000.000	DINPER TAN KP	DINPERTAN KP
				Penyediaan infrastruktur cadangan pangan pemerintah (CPPD)	Jumlah infrastruktur cadangan pangan pemerintah yang tersedia	Unit	0	0	0	1	Terkait	1.200.000.000	DINPER TAN KP	DINPERTAN KP
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	0,5	0,5	0,5	0,5	Terkait	687.501.101	DPU	Bidang SDA & Irigasi
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km		1	1	1	Terkait	948.357.425	DPU	Bidang SDA & Irigasi
				Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Meningkatnya jumlah Polder dan kolam retensi yang dipelihara	Unit				1	Terkait	100.000.000	DPU	Bidang SDA & Irigasi

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah bangunan penampung air baku terbangun	Unit				1	Terkait	5.664.396.997	DPU	Bidang SDA & Irigasi
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana wilayah	Indek daya saing infrastruktur	3,42	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km		15	15	20	Terkait	38.309.575.148	DPU	DPU
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	15	20	20	20	Terkait	9.983.460.074	DPU	DPU
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km		1,5	1,5	2	Terkait	5.479.398.456	DPU	DPU
				Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Km				0,5	Terkait	200.000.000	DPU	DPU
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jembatan				5	Terkait	410.954.884	DPU	DPU
				Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Jembatan				1	Terkait	200.000.000	DPU	DPU
				Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Unit/Jembatan				1	Terkait	1.185.446.781	DPU	DPU
				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km				0,2	Terkait	500.000.000	DPU	DPU

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Jembatan				1	Terkait	500.000.000	DPU	DPU
	Meningkatkan Kualitas Permukiman	Persentase Peningkatan Permukiman Layak Huni	12	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	Unit Rumah	200	200	200	200	Terkait	4.000.000.000	DINPER KIM	Swakelola
	Meningkatkan Cakupan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum (2024)	1,5	Melakukan pembinaan terhadap KKM (Kelompok Kerja Masyarakat) SPAM / (KPSPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	15	15	15	15	terkait	55.000.000	DINPER KIM	Swakelola Masyarakat / KSM
				melakukan perencanaan dokumen pengelolaan SPAM dan peyelidikan geolistrik	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	Tidak Terkait	300.000.000	DINPER KIM	Swakelola Masyarakat / KSM
				Melakukan peningkatan jaringan SPAM	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang	Liter/detik	10	10	10	10	terkait masyarakat	7.600.000.000	DINPER KIM	Swakelola Masyarakat / KSM

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)									
				Melakukan pengurusan IPLT	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	M3/Hari	5,58	5,58	5,58	5,58	Tidak Terkait	70.000.000	DINPER KIM	Swakelola Masyarakat / KSM
				Melakukan pelayanan Jasa Sedot Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	320	320	320	320	Terkait	100.000.000	DINPER KIM	Swakelola Masyarakat / KSM
				Pembangunan Fasilitas Pendukung IPLT	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	M3/Hari	5,58	5,58	5,58	5,58	Tidak Terkait	5.000.000	DINPER KIM	Swakelola Masyarakat / KSM
				Melakukan penyediaan sarana prasarana penyedotan	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	5	5	5	5	Tidak Terkait	5.000.000	DINPER KIM	Swakelola Masyarakat / KSM
	Meningkatnya peran serta masyarakat pada pembangunan	Prosentase desa yang meningkat statusnya	26%	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	0	0	0	100	Tidak terkait	475.000.000	DIN SOS	Bidang PED
				Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	0	0	0	301	Tidak terkait holder utama	50.000.000	DIN SOS	Bidang Bina Desa
				Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	0	0	0	301	Tidak terkait	4.140.000.000	DIN SOS	Bidang Bina Desa
				Terlaksananya	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	0	0	0	301	Tidak	150.000.000	DIN SOS	Bidang

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Pengelolaan Aset Desa						terkait		S	Bina Desa
				Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	0	0	0	3	Tidak terkait	50.000.000	DIN SOS	Bidang Permas
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	0	0	0	3	Tidak terkait	50.000.000	DIN SOS	Bidang Permas
	Meningkatnya derajat pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,40	Pembangunan Ruang Kelas Baru di jenjang SD	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0	0	27	Terkait	1.174.843.038	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di jenjang SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	54	Terkait	1.913.427.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jenjang SD	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	76	Terkait	2.774.417.818	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jenjang SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	0	0	0	17	Terkait	1.000.026.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD
				Penambahan Ruang Kelas Baru di jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	0	0	0	1	Terkait	300.000.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	0	0	2	Terkait	400.000.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	10	Terkait	2.000.000.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0	0	2	Terkait	400.000.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)

Sumber : Analisi Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.7.2 Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Permasalahan Mengurangi Beban Pengeluaran Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan	sasaran	indikator	target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Menurunkan Beban Pengeluaran	Meningkatnya Keterjangkauan Harga Pangan	Nilai Aspek Keterjangkauan Pangan dalam IKP	81,48	Penyediaan bahan pangan/ cadangan pangan untuk desa rawan pangan	Jumlah bahan pangan/ cadangan pangan yang diberikan kepada desa rawan pangan	Paket	0	0	4200	0	Terkait	325.000.000	DINPER TAN KP	DINPERTAN KP
				Penerbitan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah registrasi PSAT yang diterbitkan	Dokumen		4	4	3	Terkait	75.000.000	DINPER TAN KP	DINPERTAN KP
				Penerbitan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah rekomendasi PSAT yang diterbitkan	Dokumen		4	4	3	Terkait	75.000.000	DINPER TAN KP	DINPERTAN KP
				Pelatihan olahan pangan	Jumlah penerima pelatihan olahan	Orang	0	0	200	0	Terkait	365.000.000	DINPER TAN KP	DINPERTAN KP
				Pelatihan pemanfaatan pekarangan	Jumlah penerima pelatihan pemanfaatan pekarangan	Orang	0	0	200	0	Terkait		DINPER TAN KP	DINPERTAN KP
				Pelatihan Olahan Pangan	Jumlah keluarga yang menerima pelatihan	Keluarga	0	0	200	0	Terkait	100.000.000	DINPER TAN KP	DINPERTAN KP
				Lomba Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah lomba B2SA yang dilaksanakan/dikuti	Kegiatan	0	1	0	1	Terkait	60.000.000	DINPER TAN KP	DINPERTAN KP
	Meningkatnya derajat pendidikan	Harapan lama sekolah	13,40	Pengadaan Perlengkapan Siswa Jenjang SD (Satu Set : Buku Tulis, Pulpen, dll)	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Peserta Didik	0	0	0	1000	Terkait	200.000.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD
				Beasiswa Kartu Banyumas Pintar (KBP) kepada Peserta Didik yang Menerima Biaya	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya	Peserta Didik	0	0	0	3000	Terkait	1.520.000.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD

Permasalahan	sasaran	indikator	target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
				Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Koordinator			Pelaksanaan	
				Didik Jenjang SD	Personil Peserta Didik									
				Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	807	0	807	0	Terkait	131.936.765.296	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SD
				Beasiswa Kartu Banyumas Pintar (KBP) kepada Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	0	0	1482	Terkait	1.000.000.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP
		Rata rata lama sekolah	7.94	Pengadaan Perlengkapan Siswa Jenjang SMP	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Peserta Didik	0	0	0	4000	Terkait	30.000.000	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP
				Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	161	0	161	0	Terkait	44.997.520.349	Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan SMP
				Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang PAUD	Jumlah Peserta didik PAUD yang Menerima Biaya Personil PAUD	Peserta Didik	0	0	0	2000	Terkait	1.095.908.450	Dinas Pendidikan	Bidag Pembinaan PAUD dan DIKMAS
				Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	700	0	700	0	Terkait	12.933.053.535	Dinas Pendidikan	Bidag Pembinaan PAUD dan DIKMAS
				Beasiswa Kartu Banyumas Pintar (KBP) kepada Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	0	0	0	300	Terkait	302.000.000	Dinas Pendidikan	Bidag Pembinaan PAUD dan DIKMAS

Permasalahan	sasaran	indikator	target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
		Persentase pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	100%	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	300	Terkait	350.000.000	DINSO S	Bidang PJRS
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	100	Terkait	80.000.000	DINSO S	Bidang PJRS
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	30	Terkait	70.000.000	DINSO S	Bidang PJRS
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	10	Terkait	50.000.000	DINSO S	Bidang PJRS

Permasalahan	sasaran	indikator	target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	10	Terkait	15.000.000	DINSOS	Bidang PJRS
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	5	Terkait	15.000.000	DINSOS	Bidang PJRS
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	5	Terkait	15.000.000	DINSOS	Bidang PJRS
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	10	Terkait	20.000.000	DINSOS	Bidang PJRS

Permasalahan	sasaran	indikator	target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiata n aksi	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordin ator	Pelaksana a
								Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	5
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	5	Terkait	50.000.000	DINSO S	Bidang PJRS
Meningkat nya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,96	Kelas Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6974	6974	6974	6976	Terkait	1.857.328.916	Dinas Kesehat an	Bidang Kesehata n Masyarak at	
			Rumah Tunggu Kelahiran	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6657	6657	6657	6659	Terkait	1.539.323.700	Dinas Kesehat an	Bidang Kesehata n Masyarak at	
			Pelatihan AMP	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6340	6340	6340	6342	Terkait	1.263.872.060	Dinas Kesehat an	Bidang Kesehata n Masyarak at	
			Pelatihan MTBS	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	24672	24672	24672	24675	Terkait	493.264.500	Dinas Kesehat an	Bidang Kesehata n Masyarak at	
			Pelaksanaan skrining kesehatan kepada	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang	Orang	56285	56285	56285	56288	Terkait	4.025.490.000	Dinas Kesehat	Bidang Kesehata	

Permasalahan	sasaran	indikator	target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
								anak Udiksar	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					
				Pos pelayanan terpadu usia produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	200848	200848	200848	200849	Terkait	2.621.146.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Pelaksanaan skrining kesehatan kepada usia lanjut (60 keatas)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	73131	73131	73131	73131	Terkait	5.000.000.000	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat
				Pelayanan terpadu PTM di FKTP	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	43563	43563	43563	43566	Terkait	821.028.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Skrining di UKBM	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5847	5847	5847	5847	Terkait	2.818.428.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Pengeloaan Desa Siaga Sehat Jiwa dan Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	760	760	760	760	Terkait	354.005.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Skrining orang terduga TB sdh diinput tdk	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	Orang	4150	4150	4150	4150	Terkait	5.413.325.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada

Permasalahan	sasaran	indikator	target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksanaan
				tertampil	Pelayanan Sesuai Standar									
				Pemeriksaan/skrining HIV pada populasi khusus dan populasi kunci	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	8200	8200	8200	8200	Terkait	975.544.700	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Skrining ODMK di Posbindu,Sekolah dan fasilitas umum lainnya.	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	67283	67283	67283	67284	Terkait	56.250.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				Tes urin dan Assist di sekolah dan instansi	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	24	24	24	24	Terkait	15.000.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan pada Penyakit
				BPJS bagi masyarakat miskin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Orang	2	1	2	2	Terkait	36.357.328.000	Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Angkatan Kerja yang Bekerja dengan Pendidikan yang Ditamatkan Minimal SLTA	93.53%	Menyelenggarakan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang		100			Terkait	125.000.000	DINNA KERKOPUKM	DINNAKERKOPUKM
				Terlaksananya bimtek manajemen keuangan kepada Purna PMI untuk memperluas lapangan kerja di dalam negeri	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang			10	10	Terkait	25.000.000	DINNA KERKOPUKM	DINNAKERKOPUKM

Permasalahan	sasaran	indikator	target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan								
				Penanganan kasus terhadap perempuan	Jumlah korban perempuan yang ditangani	orang	13	13	13	13	Terkait	110.000.000	DPPKB P3A	DPPKBP3 A
				Sosialisasi pemenuhan hak anak	Jumlah sosialisasi pemenuhan hak anak	kegiatan	1	2	2	1	Terkait	35.000.000	DPPKB P3A	DPPKBP3 A
				Penyediaan data gender dan anak oleh setiap opd	Jumlah OPD yang mengelola data gender dan anak	OPD				29	Terkait	20.000.000	DPPKB P3A	DPPKBP3 A
				Pemberian nutrisi bagi ibu hamil resiko tinggi	Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang mendapat pemberian nutrisi	orang			100		Terkait	40.000.000	DPPKB P3A	DPPKBP3 A

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)

Sumber : Analisi Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.7.3 Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Permasalahan Meningkatkan Pendapatan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Meningkatkan Pendapatan	Meningkatnya penanganan sosial	Persentase pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	100%	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	0	0	0	5	Terkait	30.000.000	DINSON	Bidang PSPFM
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	30	Terkait	20.000.000	DINSON	Bidang PSPFM
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Secara Mandiri	Nilai Aspek Ketersediaan Pangan dalam IKP	83.43	Hibah sarana budidaya perikanan kepada kelompok pembudidaya ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu Daerah Kabupaten Kota	Unit				3	Terkait	100.000.000	DINKANNAK	DINKANNAK
				Hibah ternak kepada kelompok ternak	Jumlah Benih Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten Kota Lain	Ekor				30	Terkait	165.000.000	DINKANNAK	DINKANNAK
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Peternakan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit				1	Terkait	200.000.000	DINKANNAK	DINKANNAK

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
	Optimalnya Pengembangan Produk Potensi Ekonomi Daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto Sektor Potensial	48.330 Miliar	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	keluarga			60		Terkait	30.000.000	DINNA KERKO PUKM	DINNA KERKO PUKM
				Memfasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	unit usaha			10	0	Terkait	550.000.000	DINNA KERKO PUKM	DINNA KERKO PUKM
				Memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha		1		1	Terkait	100.000.000	DINNA KERKO PUKM	DINNA KERKO PUKM

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	Angkatan Kerja yang Bekerja dengan Pendidikan yang Ditamatkan Minimal SLTA	93.53%	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang			112		Terkait	495.000.000	DINNA KERKO PUKM	DINNA KERKO PUKM
				Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri / wirausaha baru	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang			60		Terkait	75.000.000	DINNA KERKO PUKM	DINNA KERKO PUKM
				Memfasilitasi kesejahteraan tenaga kerja dengan pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja dan penerimaan upah sesuai UMK	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang			1000		Terkait	79.500.000	DINNA KERKO PUKM	DINNA KERKO PUKM
				Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga				2	Terkait	1.000.000	DINNA KERKO PUKM	DINNA KERKO PUKM

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Pelaksanaan sekolah lapang	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	Unit	0	0	10	0	Terkait	100.000.000	DINPER TAN KP	DINPER TAN KP
				Pembinaan kelompok nelayan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang				10	Terkait	25.000.000	DINKA NNAK	DINKA NNAK
				Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Nelayan	Jumlah kelompok nelayan kecil yang di fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	Kelompok				1	Terkait	25.000.000	DINKA NNAK	DINKA NNAK
				Bimbingan teknis kepada kelompok pembudidaya ikan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok				5	Terkait	75.000.000	DINKA NNAK	DINKA NNAK
	Meningkatnya Kualitas Hidup	Nilai Kota/Kabupaten Layak Anak	600	Penyediaan data gender dan anak oleh setiap opd	Jumlah OPD yang mengelola data gender dan anak	OPD			29		Terkait	20.000.000	DPPKB P3A	DPPKB P3A

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	RENCANA AKSI	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Indikator	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
	Perempuan dan Anak													

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)

Sumber : Analisi Tim Penyusun, 2023

2. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting

Rencana Aksi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8 Rencana Aksi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Belum adanya satu data Sasaran Stunting	Tersedianya Satu Data Sasaran Stunting	Data Sasaran Keluarga Resiko Stunting (Catin, Ibu Hamil dan Baduta Stunted)	1 data	Melakukan koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi yg sama terkait Data Sasaran stunting	kegiatan	Jumlah koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi yg sama terkait Data Sasaran stunting				1	terkait	Rp. 3.000.000	DPPKBP3 A	Tim Percepatan Penanganan Stunting
				Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait membahas Aplikasi Satu Data Sasaran Keluarga Beresiko	kegiatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan terkait membahas Aplikasi Satu Data Sasaran Keluarga Beresiko Stunting				1	terkait	Rp. 3.000.000	DPPKBP3 A	Tim Percepatan Penanganan Stunting

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Stunting										
Kurangnya pemahaman bagi Tim Pendamping Keluarga, Nakes, dan Kader Kesehatan terkait penanganan stunting	Peningkatan pemahaman bagi Tim Pendamping Keluarga, Nakes, dan Kader Kesehatan terkait penanganan stunting	Persentase Tim Pendamping Keluarga yang mendapat pelatihan terkait penanganan stunting	80%	Pelaksanaan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) oleh PLKB Atasi Stunting di Kampung KB	kegiatan	Jumlah kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) oleh PLKB Atasi Stunting di Kampung KB	3	3	3	3	terkait	Rp. 620.000.000	DPPKBP3A, Dinkes	DPPKBP3A, Dinkes, TPK
				Sosialisasi kepada kelompok kegiatan masyarakat di Kampung KB	kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi kelompok kegiatan masyarakat di Kampung KB			2	5	terkait	Rp. 1.500.000.000	DPPKBP3A	DPPKBP3A
		Persentase Nakes Puskesmas terlatih PMBA	75%	Pelatihan PMBA bagi Nakes Puskesmas	orang	Jumlah Nakes Puskesmas terlatih PMBA		30			terkait	Rp. 210.000.000	Dinkes	Dinkes
		Persentase Puskesmas melakukan pelatihan PMBA bagi kader	100%	Pelatihan PMBA bagi kader oleh Nakes Puskesmas	Puskesmas	Jumlah Puskesmas melakukan pelatihan PMBA bagi kader		40			terkait	Rp. 96.289.369	Dinkes	Dinkes

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Belum optimalnya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ke sasaran Baduta yg terindikasi stunting	Meningkatnya status gizi Baduta terindikasi stunting	Persentase Baduta terindikasi stunting yang mendapatkan PMT	15%	Pemberian PMT pemulihan oleh Tim Dapur Sehat Atasi Stunting di Kampung KB	desa	Jumlah Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung KB yang melaksanakan pemberian PMT		20	20	20	terkait	Anggaran dari CSR	DPPKBP3A	DPPKBP3A
				PMT Lokal balita resiko stunting (gizi kurang)	Anak	Jumlah balita yang menerima PMT			70		terkait	Rp. 107.100.000 (DAU Earnmark)	DINKES	DINKES
				PMT Lokal balita resiko stunting (gizi kurang)	Anak	Jumlah balita yang menerima PMT			452		terkait	Rp. 671.220.000 (CSR Bank Jateng)	DINKES	DINKES
				PMT Lokal balita resiko stunting (gizi kurang)	orang	Jumlah ibu hamil yang menerima PMT			173		Tidak terkait	Rp. 355.780.000 (CSR Bank Jateng)	DINKES	DINKES
Belum optimalnya pelaporan Tim Pendamping Kecamatan melalui aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Hamil) belum optimal	Capaian kinerja Tim dapat terevaluasi secara berkala	Persentase Tim Pendamping Kecamatan yang melaporkan secara berkala melalui aplikasi Elsimil	40%	Bintek / Pelatihan Aplikasi Elsimil bagi TPK	orang	Jumlah anggota TPK yang mengikuti bintek/pelatihan aplikasi Elsimil	3.807				terkait	Rp. 911.000.000	DPPKBP3A	DPPKBP3A

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Evaluasi Data hasil Pendampingan TPK	dokumen	Jumlah laporan evaluasi Data hasil pendampingan TPK	3	3	3	3	terkait	Rp. 4.187.700.000	DPPKBP3A	DPPKBP3A
Belum optimalnya kolaborasi Perangkat Daerah dan Faskes dalam pendampingan percepatan penurunan stunting	Meningkatnya peran serta Perangkat Daerah dan Faskes dalam pendampingan percepatan penurunan stunting	Persentase Perangkat Daerah dan Faskes yang berperan dalam pendampingan percepatan penurunan stunting	100%	Rapat koordinasi Perangkat Daerah dan Faskes dalam rangka pendampingan percepatan penurunan stunting	kegiatan	Jumlah Rapat koordinasi Perangkat Daerah dan Faskes dalam rangka pendampingan percepatan penurunan stunting		1	1	1	terkait	Rp. 106.145.000	DPPKBP3A,Dinkes	Seluruh Perangkat Daerah
				Rembuk stunting	kegiatan	Jumlah kegiatan rembuk stunting	1				terkait	Rp. 6.000.000	DPPKBP3A,Dinkes	Tim Percepatan Penanganan Stunting
				Pelaksanaan mini lokakarya penanganan stunting	kegiatan	Jumlah kegiatan mini lokakarya penanganan stunting		1	1	1	terkait	Rp. 352.855.000	DPPKBP3A,Dinkes	Seluruh Perangkat Daerah
				Audit Kasus Stunting	Dokumen	Jumlah laporan audit kasus stunting		1		1	terkait	Rp. 80.000.000	DPPKBP3A,Dinkes	DPPKBP3A,Dinkes

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.9 Rencana Aksi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Kurangnya pemahaman bagi Tim Pendamping Keluarga, Nakes, dan Kader Kesehatan terkait penanganan stunting	Peningkatan pemahaman bagi Tim Pendamping Keluarga, Nakes, dan Kader Kesehatan terkait penanganan stunting	Presentase Tim Pendamping Keluarga yang mendapat pelatihan terkait penanganan stunting	100%	Pelaksanaan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) oleh PLKB Atasi Stunting di Kampung KB	kegiatan	Jumlah kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) oleh PLKB Atasi Stunting di Kampung KB	3	3	3	3	terkait	Rp. 200.000.000	DPPKBP3A,Dinkes	DPPKBP3A ,Dinkes, TPK
				Sosialisasi kepada kelompok kegiatan masyarakat di Kampung KB	kegiatan	Jumlah kegiatan sosialisasi kelompok kegiatan masyarakat di Kampung KB	3	8	8	8	terkait	Rp. 5.000.000.000	DPPKBP3A	DPPKBP3A
		Prosentase Puskesmas melakukan pelatihan PMBA bagi kader	100%	Pelatihan PMBA bagi kader oleh Nakes Puskesmas	Puskesmas	Jumlah Puskesmas melakukan pelatihan PMBA bagi kader		20	20		terkait	Rp. 96.289.369	Dinkes	Dinkes
Belum optimalnya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ke sasaran Baduta yg terindikasi stunting	Meningkatnya status gizi Baduta terindikasi stunting	Prosentase Baduta terindikasi stunting yang mendapatkan PMT	20%	Pemberian PMT pemulihan oleh Tim Dapur Sehat Atasi Stunting di Kampung KB	desa	Jumlah Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung KB yang melaksanakan pemberian PMT	3	5	7	7	terkait	Anggaran dari CSR	DPPKBP3A	DPPKBP3A
				PMT Lokal balita resiko stunting (gizi kurang)	Anak	Jumlah balita yang menerima PMT		914	914	914	terkait	Rp. 2.534.103.000 (DAK Non Fisik)	DINKES	DINKES

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				PMT Lokal balita resiko stunting (gizi kurang)	orang	Jumlah ibu hamil yang menerima PMT		464	464	464	terkait	Rp. 3.595.230.000 (DAK Non Fisik)	DINKES	DINKES
Belum optimalnya pelaporan Tim Pendamping Kecamatan melalui aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Hamil) belum optimal	Capaian kinerjaTim dapat terevaluasi secara berkala	Prosentase Tim Pendampingan Kecamatan yang melaporkan secara berkala melalui aplikasi Elsimil	50%	Bintek / Pelatihan Aplikasi Elsimil bagi TPK	orang	Jumlah anggota TPK yang mengikuti bintek/pelatihan aplikasi Elsimil	3.807				terkait	Rp. 911.000.000	DPPKBP3 A	DPPKBP3A
				Evaluasi Data hasil Pendampingan TPK	dokumentasi	Jumlah laporan evaluasi Datahasil pendampingan TPK	3	3	3	3	terkait	Rp. 4.192.500.000	DPPKBP3 A	DPPKBP3A
Belum optimalnya kolaborasi Perangkat Daerah dan Faskes dalam pendampingan percepatan penurunan stunting	Meningkatnya peran serta Perangkat Daerah dan Faskes dalam pendampingan percepatan penurunan stunting	Prosentase Perangkat Daerah dan Faskes yang berperan dalam pendampingan percepatan penurunan stunting	100%	Rapat koordinasi Perangkat Daerah dan Faskes dalam rangka pendampingan percepatan penurunan stunting	kegiatan	Jumlah Rapat koordinasi Perangkat Daerah dan Faskes dalam rangka pendampingan percepatan penurunan stunting		1	1	1	terkait	Rp. 118.145.000	DPPKBP3 A,Dinkes	Seluruh Perangkat Daerah
				Rembuk stunting	kegiatan	Jumlah kegiatan rembuk stunting	1				terkait	Rp. 118.145.000	DPPKBP3 A,Dinkes	Tim Percepatan Penanganan Stunting

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Pelaksanaan mini lokakarya penanganan stunting	kegiatan	Jumlah kegiatan mini lokakarya penanganan stunting		1	1	1	terkait	Rp. 550.000.000	DPPKBP3 A,Dinkes	Seluruh Perangkat Daerah
				Audit Kasus Stunting	Dokumen	Jumlah laporan audit kasus stunting		1		1	terkait	Rp. 120.000.000	DPPKBP3 A,Dinkes	DPPKBP3A ,Dinkes

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

3. Pengendalian Inflasi

Rencana Aksi Pengendalian Inflasi sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10 Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Ketidakstabilan harga komoditas pangan	Terwujudnya stabilisasi harga	Tingkat Inflasi	3%±1 %	Menyelenggarakan Operasi Pasar saat harga komoditas tertentu mengalami kenaikan	kegiatan	Jumlah Kegiatan Operasi Pasar	23				terkait	Rp.654.193.000	Dinperindag	Dinperindag
				Menyelenggarakan Pasar Murah	kegiatan	Jumlah Kegiatan Pasar Murah	1	1	1	1	terkait	Rp.30.000.000	Dinperindag	Dinperindag
Belum tersedianya data harga secara komprehensif	Tersedianya data perkembangan harga bahan	Laporan perkembangan harga bahan	240	Melaksanakan pemantauan harga barang kebutuhan	laporan	Jumlah laporan harga bahan pokok	60	60	60	60	terkait	Rp 7.000.000,00	Dinperindag	Dinperindag

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
	pokok	pokok		pokok										
Kurang stabilnya ketersediaan pasokan pangan	Terwujudnya ketersediaan pasokan pangan	Neraca Pangan Strategis	70%	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	laporan	Jumlah laporan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan		6			terkait	Rp. 1.625.000,00	Dinpertan	Dinpertan
				Pemberian bantuan bahan kimia (insektisida, rodentisida dan belerang) untuk gerakan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)	Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan bahan kimia	9	23	17		terkait	Rp. 33.990.000,00	Dinpertan	Dinpertan
				Monev dampak perubahan iklim terhadap perkembangan OPT serta Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT	Laporan	Jumlah laporan monev	3	3	3	3	terkait	Rp. 2.250.000,00	Dinpertan	Dinpertan
				Produksi Benih Padi, untuk bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat bencana alam ataupun ledakan OPT	Ton	Jumlah Produksi Benih Padi, untuk bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat bencana alam ataupun ledakan OPT		3		3	terkait	Rp. 75.000.000,00	Dinpertan	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
					Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Tani penerima bantuan benih		12			terkait	Rp . 0		
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	unit	Jaringan irigasi yang lancar				28	terkait	Rp. 6.031.200.000,00	Dinpertan	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan usaha Tani	unit	Jumlah jalan usaha tani yang layak				54	terkait	Rp. 8.066.400.000,00	Dinpertan	
				Pembinaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	LUPM	Jumlah LUPM (Lembaga Usaha Pangan Masyarakat) yang dibina		11			terkait	Rp. 6.930.000,00	Dinpertan	
				Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani (KWT/Kelompok Wanita Tani)	Kelompok Wanita Tani	Jumlah kelompok wanita tani yang mengikuti pelatihan	40				terkait	Rp 25.000.000,00	Dinpertan	
				Penyusunan Neraca Bahan Pangan (NBM) yang merupakan data penyediaan dan penggunaan pangan di Kabupaten Banyumas	Laporan	Laporan NBM				1	terkait	Rp. 0	Dinpertan	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Kurang optimalnya koordinasi antar anggota TPID	Terciptanya komunikasi efektif	% hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Rapat Koordinasi TPID dan Release Inflasi	kegiatan	Jumlah rapat koordinasi TPID dan Release Inflasi	3	3	3	3	Tidak terkait	20.000.000,00	Bagian Perekonomian Setda	
				Pelaksanaan HLM (High Level Meeting/TPID	kegiatan	Jumlah HLM (High Level Meeting/TPID yang dilaksanakan	1			1	Tidak terkait	19.000.000,00	Bagian Perekonomian Setda	

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.11 Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Ketidakstabilan harga komoditas pangan	Terwujudnya stabilisasi harga	Tingkat Inflasi	2,5%± 1%	Menyelenggarakan Operasi Pasar saat harga komoditas tertentu mengalami kenaikan	kegiatan	Jumlah kegiatan Operasi Pasar	5 atau kondisional	5 atau kondisional	5 atau kondisional	5 atau kondisional	terkait	Rp. 2.843.626.031	Dinperindag	Dinperindag
				Menyelenggarakan Pasar Murah	kegiatan	Jumlah kegiatan Pasar Murah		1		1			Dinperindag	Dinperindag
Belum tersedianya data harga secara komprehensif	Tersedianya data perkembangan harga bahan pokok	Jumlah laporan	240	Melaksanakan pemantauan harga barang kebutuhan pokok	laporan	Jumlah laporan pengendalian harga dan stok bahan pokok	60	60	60	60	terkait	Rp. 15.000. 000	Dinperindag	Dinperindag

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Kurang optimalnya koordinasi antar anggota TPID	Terciptanya komunikasi efektif	% hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Rapat Koordinasi TPID dan Release Inflasi	kegiatan	Jumlah Rapat Koordinasi TPID dan Release Inflasi	3	3	3	3	tidak terkait	Rp. 4.500.000,00	Bagian Perekonomian Setda	Bagian Perekonomian Setda
				Pelaksanaan <i>High Level Meeting</i> (HLM) TPID	kegiatan	Memperkuat koordinasi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)		1		1	tidak terkait	Rp. 19.000.000,00	Bagian Perekonomian Setda	Bagian Perekonomian Setda
Kurang stabilnya ketersediaan pasokan pangan	Terwujudnya stabilisasi harga	Prosentase ketersediaan pasokan pangan strategis	70%	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Kegiatan	Jumlah kegiatan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan		1			terkait	Rp. 2.325.000	Dinptan KP	Dinptan KP
				Pemberian bantuan bahan kimia (insektisida, rodentisida dan belerang) untuk gerakan pengendalian OPT	jenis	Jumlah jenis bantuan bahan kimia	3	3	3	3	terkait	Rp. 33.990.000	Dinptan KP	Dinptan KP
				Monev dampak perubahan iklim terhadap perkembangan OPT serta Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT	Laporan	Jumlah laporan monev	3	3	3	3	terkait	Rp. 4.250.000	Dinptan KP	Dinptan KP
				Produksi Benih Padi, untuk bantuan bagi petani yang mengalami gagal	kegiatan	Jumlah penyaluran bantuan	1			1	terkait	Rp. 75.000.000	Dinptan KP	Dinptan KP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				panen akibat bencana alam ataupun ledakan OPT										
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	unit	Jaringan irigasi yang lancar				15	terkait	Rp. 3.231.000.000	Dinperta n KP	Dinperta n KP
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan usaha Tani	unit	Jumlah jalan usaha tani yang layak				20	terkait	Rp. 2.987.555.560	Dinperta n KP	Dinperta n KP
				Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Lembaga	Jumlah LUPM		11			terkait	Rp. 6.930.000	Dinperta n KP	Dinperta n KP
				Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan, KWT, P4S)	kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan		1			terkait	Rp. 25.000.000	Dinperta n KP	Dinperta n KP
				Penyusunan Neraca Bahan Pangan (NBM) yang merupakan data penyediaan dan penggunaan pangan di Kabupaten Banyumas	Laporan	Laporan NBM				1	terkait	Rp. 0	Dinperta n KP	Dinperta n KP

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

4. Peningkatan Investasi

Rencana Aksi Peningkatan Investasi sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12 Rencana Aksi Peningkatan Investasi Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi*	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
			2023		Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Belum Optimalnya Investasi di Kabupaten Banyumas	Meningkatnya nilai investasi daerah	Realisasi Investasi (Jumlah PMDN dan PMA)	Rp 1 Triliun	Menyelenggarakan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan dan Pengawasan	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan dan Pengawasan	2	-	3	1	terkait	Rp. 184.840.500	DPMPPTSP	Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
		Jumlah Pelaku Usaha penerima manfaat	735 Pelaku Usaha	Menyelenggarakan pendampingan bagi pelaku usaha penerima manfaat	Orang	Jumlah pelaku usaha penerima manfaat	175	120	360	80	terkait	Rp. 0	DPMPPTSP	Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
	Meningkatnya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan	11 kegiatan	Menyelenggarakan Sosialisasi Perizinan Berusaha dan Nonberusaha	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perizinan	-	5	6	-	terkait	Rp. 166.950.000	DPMPPTSP	1. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesra 2. Bidang Pelayanan

	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	90	Menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	88	89	90	terkait	Rp. 0	DPMPTSP	Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Penanaman Modal Sektor Pembangunan dan LH
Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah kegiatan Promosi Penanaman Modal	2	Melaksanakan Promosi Potensi Daerah pada Pameran Investasi	kegiatan	Jumlah pameran investasi/expo	-	-	2	-	terkait	Rp. 66.018.100	DPMPTSP	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	
	Baliho promosi Penanaman Modal	3 Baliho	Memasang Baliho promosi Penanaman Modal	baliho	Jumlah baliho promosi penanaman modal	3	-	-	-	terkait	Rp. 3.750.000	DPMPTSP	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	
Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang Tersedia	3 dokumen	Membuat Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	dokumen	Analisis Bisnis/Feasibility Study	1	-	2	-	terkait	Rp. 39.000.000	DPMPTSP	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	
	Bahan	1 video	Penyusunan Video	video	Jumlah Video	-	-	-	1	Tidak	Rp. 0	DPMPTSP	1. Bidang	

	Informasi Penanaman Modal melalui media digital	Promosi Penanaman Modal		Promosi Digital sebagai bahan promosi penanaman modal		Promosi Penanaman Modal					terkait			Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
														2. Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.13 Rencana Aksi Peningkatan Investasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Belum optimalnya Investasi di Kabupaten Banyumas	Meningkatnya nilai investasi daerah	Realisasi Investasi (Jumlah PMDN dan PMA)	Rp 1 Triliun	Menyelenggarakan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan dan Pengawasan	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan dan Pengawasan	2	2	1	1	terkait	Rp. 184.840.500	DPMPT SP	Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
		Jumlah Pelaku Usaha penerima manfaat	250 Pelaku Usaha	Menyelenggarakan pendampingan bagi pelaku usaha penerima manfaat	Orang	Jumlah pelaku usaha penerima manfaat	70	70	70	40	terkait	Rp. 85.967.000	DPMPT SP	Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordin ator	Pelaksana
	Meningkatnya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 kegiatan	Menyelenggarakan Sosialisasi Perizinan Berusaha dan Nonberusaha	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perizinan	-	4	4	2	terkait	Rp. 166.950.000	DPMPT SP	Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal
	Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 kegiatan	Melaksanakan Promosi Potensi Daerah pada Pameran Investasi	kegiatan	Jumlah pameran investasi/expo			1	1	terkait	Rp. 92.050.000	DPMPT SP	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
		Baliho promosi Penanaman Modal	3 Baliho	Memasang Baliho promosi Penanaman Modal	baliho	Jumlah baliho promosi penanaman modal	3				terkait	Rp. 3.750.000	DPMPT SP	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang Tersedia	1 dokumen	Membuat Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	dokumen	Analisis Bisnis/ Feasibility Study	1				terkait	Rp. 50.000.000	DPMPT SP	Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
	Meningkatnya Informasi Penanaman Modal melalui media digital	Bahan Promosi Penanaman Modal	1 video	Penyusunan Video Promosi Digital sebagai bahan promosi penanaman modal	video	Jumlah Video Promosi Penanaman Modal			1		Tidak terkait	Rp. 0	DPMPT SP	1.Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal 2.Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14 Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) perlu ditingkatkan	Meningkat nya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	50%	Rapat Koordinasi Tim P3DN Kab. Banyumas	kegiatan	Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim P3DN Kab. Banyumas	1	1	1	1	terkait	Rp. 24.500.000,00	Dinperindag Kab. Banyumas	Dinperindag Kab. Banyumas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2023	Rencana Aksi	Output		Target 2023				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Fasilitasi Produk UMKM dalam proses penayangan produk di E-Katalog Lokal	Jumlah produk tayang	Produk UMKM yang ditayangkan di e-Katalog Lokal	2.000	2.000	2.000	2.000	terkait	Rp. 2.500.000,00	Sekretariat Daerah Kab. Banyumas (Bagian Layanan Pengadaan), Dinperindag Kab. Banyumas	Sekretariat Daerah Kab. Banyumas (Bagian Layanan Pengadaan), Dinperindag Kab. Banyumas
				Pengawasan P3DN di Kab. Banyumas	dokumen	Dokumen Hasil Pengawasan P3DN di Kab. Banyumas	1	1	1	1	terkait	Rp. 15.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Banyumas	Inspektorat Daerah Kab. Banyumas

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

Tabel 3.15 Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banyumas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) perlu ditingkatkan	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	50%	Rapat Koordinasi Tim P3DN Kab. Banyumas	kegiatan	Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim P3DN Kab. Banyumas	1	1	1	1	terkait	Rp. 25.000.000,00	Dinperindag Kab. Banyumas	Dinperindag Kab. Banyumas

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Rencana Aksi	Output		Target 2024				Jenis kegiatan aksi *	Jumlah Anggaran	Unit/satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Pelaksana
				Fasilitasi Produk UMKM dalam proses penayangan produk di E-Katalog Lokal	Jumlah produk tayang	Produk UMKM yang ditayangkan di e-Katalog Lokal	150	150	150	150	terkait	Rp. 25.000.000,00	Sekretariat Daerah Kab. Banyumas (Bagian Layanan Pengadaan), Dinperindag Kab. Banyumas	Sekretariat Daerah Kab. Banyumas (Bagian Layanan Pengadaan), Dinperindag Kab. Banyumas
				Pengawasan P3DN di Kab. Banyumas	dokumen	Dokumen Hasil Pengawasan P3DN di Kab. Banyumas	1	1	1	1	Tidak terkait	Rp. 42.000.000,00	Inspektorat Daerah Kab. Banyumas	Inspektorat Daerah Kab. Banyumas

* : (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2023

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit* (STU)). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di masing-masing pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. Melaksanakan *Road Map* RB dan program-program prioritas di pemerintah daerah serta unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai

unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

B. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun semesteran.

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi :

a) Monitoring dan Evaluasi di tingkat Instansi Pemerintah Daerah

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi selaku koordinator adalah Inspektorat Daerah yang dilakukan dengan cara memantau program dan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam rencana aksi.

b) Monitoring dan Evaluasi di tingkat Perangkat Daerah

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi kegiatan utama pada Perangkat Daerah yang melekat pada Perangkat Daerah dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah.

2. Waktu Pelaksanaan

a) Monitoring dan Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan setiap semester;

b) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas secara keseluruhan dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

3. Anggaran Monitoring dan Evaluasi

a) Anggaran Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas secara keseluruhan dibebankan kepada Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas;

b) Anggaran Monitoring dan Evaluasi masing-masing Kegiatan Utama pada RB General dan tiap-tiap tema pada RB tematik dibebankan

pada Perangkat Daerah Pengampu melalui kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

4. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

- a) Berisi capaian atas indikator-indikator Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB;
- b) Formulir Reformasi Birokrasi, sesuai dengan Kegiatan Utama dalam RB General dan tema-tema dalam RB Tematik;
- c) Instrumen yang diciptakan sendiri berdasarkan kebutuhan data perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diinginkan.

5. Tindak Lanjut dan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas disampaikan Kepada Bupati Banyumas.

BAB V PENUTUP

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman RB yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2023-2024 ini akan menjadi acuan bagi pimpinan dan seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan program dan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk tahun 2023-2024.

Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Banyumas harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN